

**ANALISIS SOSIOEKONOMI
POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
DI KECAMATAN TANIWEL DAN WAESALA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU**

RAMLAN BURU



**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2007**

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis yang berjudul:

**ANALISIS SOSIOEKONOMI
POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
DI KECAMATAN TANIWEL DAN WAESALA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU**

adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Januari 2007

Yang menyatakan,

Ramlan Buru
Nrp. A155030221

ABSTRAK

Ramlan Buru, Analisis Sosioekonomi Pola Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Taniwel dan Waesala Kabupaten Seram bagian Barat Provinsi Maluku (Isang Gonarsyah sebagai Ketua dan Dominicus Savio Priyarsono sebagai Anggota Komisi Pembimbing).

Dalam era otonomi daerah berbagai pola pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah maupun lembaga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perbedaan pola pemberdayaan nelayan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala. Ditemukan bahwa pola pendekatan *bottom-up* di Kecamatan Taniwel lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daripada di Kecamatan Waesala karena lebih mampu memanfaatkan dan membangkitkan stok *existing* modal sosial masyarakat, sehingga program menjadi terintegrasi dengan keinginan masyarakat

Kata kunci: modal sosial, pemberdayaan masyarakat, integrasi, kesejahteraan

©Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007
Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik cetak, fotocopi, mikrofilm, dan sebagainya.

**ANALISIS SOSIOEKONOMI
POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
DI KECAMATAN TANIWEL DAN KECAMATAN WAESALA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU**

RAMLAN BURU

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada
Program Studi Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2007**

Dosen Penguji Ujian Tesis : Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Agr.

Judul Tesis : ANALISIS SOSIOEKONOMI POLA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN TANIWEL
DAN KECAMATAN WAESALA KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU

Nama : Ramlan Buru

Nomor Pokok : A155030221

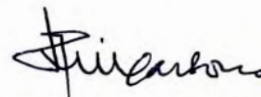
Program Studi : Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

Menyetujui,

1. Komisi Pembimbing



Prof. Ir. Isang Gonarsyah, Ph.D
Ketua

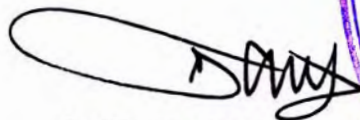


Dr. Ir. D S. Priyarsono, MS
Anggota

Mengetahui,

2. Ketua Program Studi
Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan
Wilayah dan Perdesaan

3. Dekan Sekolah Pascasarjana
Institut Pertanian Bogor



Prof. Ir. Isang Gonarsyah, Ph.D



Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

Tanggal Ujian: 4 Januari 2007

Tanggal Lulus : 1 - 8-2007

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Analisis Sosioekonomi Pola Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Taniwel dan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku”. Tesis ini merupakan tugas akhir pendidikan magister sains pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Ir. Isang Gonarsyah, Ph.D selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Dr. Ir. D. S. Priyarsono, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktu dan kesempatannya memberi bimbingan dan arahan serta memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Kepada Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS dan Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Bapak Prof. Ir. Isang Gonarsyah, Ph.D, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menerima penulis untuk mengikuti pendidikan magister serta segala bantuan dan kesempatan yang diberikan selama mengikuti pendidikan. Demikian juga penulis haturkan terima kasih kepada para Dosen PS. PWD atas bekal ilmu yang diberikan serta pandangan dan kekeluargaan yang terjalin selama ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Passo-Ambon dan staf atas kesempatan yang diberikan pada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di IPB Bogor dan bantuan dana penelitian. Tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sama kepada Bapak Drs. I. Saimima Kerteker Bupati, Bapak Ir. Rahadji Sangadji sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Seram Bagian Barat beserta stafnya terutama Amir Wael, serta pertugas di Kecamatan Taniwel Ahmat Niwele dan di Kecamatan Waesala Suparno, Kepala Kecamatan Taniwel, Kepala Desa Kasieh dan Ketua, Pengurus dan Anggota AMS Kecamatan Taniwel, Pengurus PKM

Wilayah Maluku, Kepala Kecamatan Waesala, Kepala Dusun Pulau Kasuari dan Rahai Pulau Kelang serta masyarakatnya yang terlibat dalam kelompok nelayan pancing tunda program pemberdayaan dengan ikhlas memberikan keterangan, fasilitasnya selama mengikuti pendidikan dan terutama ketika mendampingi penulis melaksanakan penelitian lapangan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan PS.PWD 2003 atas kebersamaan yang terbina dalam meniti ilmu di bumi Pakuan. Kepada teman-teman: Kristo dan Keluarga, Bobby Asdy, Daeng Mahyudin dan Keluarga, Caca Titi, Bung Alor Yunus, Uda Jhon dan Keluarga, Agam Fadly, Agam Ramzy, Arys, Te Riri, Mba Fudho, Mas Iwan dan Cut Mimi, Butet May, Mika, Aa Asep, Aa Sony dan keluarga, senyor Abah Mubarak, Bapak Edy, Uda Ricky, Sinyo Sony Rambet (Almarhum), Uda Askar terima kasih atas bantuan, perhatian dan motivasi yang diberikan. Kepada Kelurahan Sukaresmi dan stafnya, kepala desa Cibatok dan stafnya, pengurus dan anggota Kalam serta warga masyarakat yang melayani penulis dan teman-teman dalam praktek perencanaan partisipatif, serta Pa Ega dan keluarga, Pa Muhuria dan keluarga, Pa Natsir dan keluarga yang selalu membantu, membimbing dan mendorong untuk penyelesaian studi di IPB.

Kupersembahkan Khusus kepada istri tercinta Rosna Sangadji, anak-anakku tersayang Ghazel, Rabhil, Rizky, dan Faradilla yang selalu menemani dan memberikat dorongan pada sang suami dan bapaknya selama mengikuti pendidikan dirantau orang yang jauh dari kampung halaman. Ayahanda dan Bunda tercinta (Almarhumah), serta adik-adik tersayang Nur, Udin, Yam, Ita, Syukur, Salim, Icha, Bilma, dan Baing yang selalu memberi semangat moral maupun material setiap saat.

Akhirnya disadari penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan yang karena keterbatasan penulis. Untuk kesempurnaannya kritik dan saran diharapkan dari berbagai pihak. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Bogor, Januari 2007

Ramlan Buru

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ambon, Provinsi Maluku pada tanggal 27 Oktober 1960 sebagai anak pertama dari sembilan bersaudara dari pasangan Bpk. Oemar Boeroe, dan Ibu Ny. E Djamalia (Almarhumah).

Pendidikan sekolah dasar ditempuh pada SD Alhilal II Batumerah Ambon dan tamat tahun 1974, Pendidikan sekolah menengah pertama ditempuh pada SMP Muhammadiyah Ambon dan tamat tahun 1977 selanjutnya pendidikan sekolah menengah atas ditempuh pada SPMA Negeri Ambon dan tamat tahun 1981. Pendidikan sarjana pada Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon dan tamat pada tahun 1988.

Pada tahun 1989 penulis bekerja sebagai staf pengajar Sekolah Pertanian Pembangunan-Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA) Negeri Passo-Ambon hingga sekarang. Pada tahun 2003 penulis mengikuti Pendidikan Magister Sains pada Program Studi Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Institut Pertanian Bogor dengan biaya sendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Permasalahan	2
Tujuan Penelitian	3
Manfaat Penelitian	3
 TINJAUAN TEORITIS DAN PENELITIAN TERDAHULU	
Pemberdayaan Masyarakat.....	4
Faktor-Faktor Penentu Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat.....	5
Perilaku Pembawa Program (<i>Action</i>).....	5
Perilaku Penerima Program (<i>Reaction</i>)	5
Modal Sosial Penerima Program	6
 METODOLOGI PENELITIAN	
Kerangka Pemikiran	8
Hipotesis	9
Metode Penelitian	10
Lokasi dan Waktu Penelitian	10
Metode Penarikan Contoh	10
Jenis dan Sumber Data	10
Metode Analisis Data	10
Definisi Operasional	11
 HASIL DAN PEMBAHASAN	
Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	14
Pola Pemberdayaan Masyarakat.....	19
Sosialisasi Program	22
Perencanaan Program	24
Pelaksanaan Program	26
Pendampingan Program	30
Pengawasan Program	31
Karakteristik Pembawa Program	32
Karakteristik Penerima Program	36

Determinan Penerima Program (<i>Reaction</i>)	37
Stok <i>Existing</i> Modal Sosial	42
Dampak Pemberdayaan terhadap Peningkatan Integrasi dan Peningkatan Stok Modak Sosial	47
Dampak Pemberdayaan terhadap Peningkatan Dimensi Struktural.....	50
Dampak Pemberdayaan terhadap Peningkatan Dimensi kognitif.....	52
Dampak Pemberdayaan terhadap Peningkatan Aksi Kolektif.....	53
Dampak Integrasi Program terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	54
 SIMPULAN DAN SARAN	
Simpulan.....	58
Saran.....	58
 DAFTAR PUSTAKA	59
 LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Beberapa Indikator di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala	14
2. Jumlah Nelayan dan Produksi Hasil Perikanan di Kecamatan Waesala dan di Kecamatan Taniwel Tahun 2004.....	15
3. Jumlah Armada Penangkapan Ikan Menurut Ukuran di Kecamatan di Kecamatan Waesala dan di Kecamatan Taniwel Tahun 2004	15
4. Jumlah Kelompok Nelayan Pancing Tunda dan Keberlanjutan Keaktifan Kelompok Tahun 2002-2005	29
5. Perbandingan Variabel Pembawa Program di Kecamatan Waesala dan di Kecamatan Taniwel	33
6. Perbandingan Variabel Penerima Program Pemberdayaan di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala	37
7. Stok <i>Existing</i> Modal Sosial dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala Tahun 2006	43
8. Dimensi Struktural Stok <i>Existing</i> Modal Sosial dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala Tahun 2006	43
9. Dimensi Kognitif Stok <i>Existing</i> Modal Sosial dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala Tahun 2006	46
10. Aksi Kolektif Stok <i>Existing</i> Modal Sosial dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala Tahun 2006.....	47
11. Dampak Pemberdayaan terhadap Peningkatan Integrasi dan Modal Sosial di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala.....	48
12. Dampak Program Pemberdayaan terhadap Peningkatan Dimensi Struktural di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala	51
13. Dampak Pemberdayaan terhadap Peningkatan Dimensi Kognitif di Kecamatan Taniwel dan Waesala	52
14. Dampak Pemberdayaan terhadap Peningkatan Aksi Kolektif di	54

Kecamatan Taniwel dan di Waesala	
15. Koefisien Regresi Logit Modal Sosial terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram bagian Batar	55
16. Koefisien Regresi Logit Komponen Dimensi Struktural yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram bagian Batar	57
17. Koefisien Regresi Logit Komponen Dimensi Kognitif yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram bagian Batar	57
18. Koefisien Regresi Logit Komponen Aksi Kolektif yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram bagian Batar	59

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Sketsa Kerangka Pemikiran.....	9

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Peta Lokasi Penelitian Kabupaten Seram bagian Barat	62
2.	Indikator Pengukuran, Definisi Operasional, dan Tahap Pengolahan Data	63
3.	Rumus perhitungan indeks komposit modal sosial	69
4.	Regresi Model Logit	70
5.	Descriptive Statistic Pemberdayaan di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala	72
6.	Uji Nilai Tengah Pemberdayaan di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala	74
7.	Descriptive Statistic Modal Sosial di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala	79
8.	Uji Nilai Tengah Modal Sosial di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala	80
9.	Hasil Analisis Regresi Logit untuk Integrasi Program Pemberdayaan di Kecamatan Taniwel	83
10.	Hasil Analisis Regresi Logit untuk Integrasi Program Pemberdayaan di Kecamatan Waesala	84
11.	Biaya Operasional, Pendapatan Kotor Nelayan Peserta Sebelum dan Sesudah Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala per Tahun	85

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Seram bagian Barat adalah kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, yang terdiri atas empat kecamatan, yaitu Piru, Kairatu, Taniwel dan Waesala. Dengan pembentukan Kabupaten Seram bagian Barat diharapkan akan menjadi peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat di wilayah ini untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia di daerahnya (UU RI No 40 Tahun 2003) secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sejatinya, dengan otonomi daerah telah terjadi perubahan paradigma, yaitu dari paradigma pembangunan ke paradigma pelayanan dan pemberdayaan masyarakat (Gonarsyah, 2006)

Potensi sumberdaya perikanan, terutama perikanan tangkap di Kecamatan Waesala dan Kecamatan Taniwel sangat tinggi, namun kedua wilayah kecamatan tersebut relatif tertinggal dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya di Kabupaten Seram bagian Barat. Hal ini tampaknya berkaitan dengan oleh kebijakan dan implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini lebih berorientasi pada pencapaian kinerja proyek secara administrasi dan fisik, dan belum memperhatikan akuntabilitas program secara serius (Laporan Tahunan Kapet Seram 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, Riyadi dan Bratakusumah (2003), menyatakan bahwa implementasi otonomi daerah seharusnya lebih berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat dan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuannya (*bottom-up approach*) daripada pendekatan yang bersifat sentralistik (*top-down approach*). Dengan pendekatan *bottom-up* diharapkan agar pelaku pembangunan di daerah menjadi lebih mampu berkeaktivitas untuk mengembangkan ekonomi rakyat dalam kerangka pembangunan wilayah dan daerah perdesaan yang terpadu.

Permasalahan

Secara umum upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Seram bagian Barat, khususnya di Kecamatan Waesala dan Kecamatan Taniwel menghadapi beberapa kendala sebagai berikut: (1) infrastruktur penunjang yang tidak memadai untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan, (2) rendahnya kemampuan sumberdaya yang meliputi ketersediaan sumberdaya manusia, kelembagaan, pelayanan dan keseriusan pemerintah untuk mengelola sumberdaya perikanan tangkap secara berkelanjutan, dan (3) tingginya potensi konflik dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, antara lain pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di perairan Laut Seram dan sekitarnya yang menjadi wilayah tangkapan nelayan pancing tunda, menyempitnya wilayah tangkapan nelayan pancing tunda karena terhalang oleh rumpon-rumpon milik perusahaan perikanan berskala besar, dan nelayan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan potasium di beberapa lokasi terumbu karang (Laporan Tahunan Kapet Seram 2004).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di kedua kecamatan tersebut, maka sejak tahun 2001 telah di adopsi dua pola pemberdayaan yang berbeda, yaitu pola *top-down* di Kecamatan Waesala dan pola *bottom-up* di Kecamatan Taniwel. Dalam perkembangannya ternyata jumlah kelompok nelayan yang mengikuti kedua program pemberdayaan tersebut mengalami penurunan, dimana penurunan jumlah kelompok di Kecamatan Waesala jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Kecamatan Taniwel, yaitu dari 41 kelompok menjadi 17 kelompok di Kecamatan Waesala, sedangkan di Kecamatan Taniwel dari 23 kelompok berkurang menjadi 21 kelompok. Dilaporkan juga bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi peserta program di Kecamatan Taniwel lebih tinggi daripada di Kecamatan Waesala. Oleh karena itu menarik untuk dikaji apakah perbedaan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di kedua kecamatan tersebut berkaitan dengan perbedaan pola pemberdayaannya? Sejauhmana dampak interaksi antara pembawa program dengan penerima program terhadap peningkatan modal sosial dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah penelitian?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perbedaan pola pemberdayaan masyarakat nelayan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah dan lembaga lain yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENELITIAN TERDAHULU

Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan dalam bahasa Inggris adalah *empowerment dan empower*. Menurut *Merriam Webster dan Oxford English Dictionnary*, kata *Empower* mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority to*, dan pengertian kedua yaitu *to give ability to or to enable*. Dalam pengertian pertama, diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan (Priyono dan Pranarka 1996). Sejalan dengan itu, Thomas (1992) menyatakan bahwa konsep *power* dalam masyarakat adalah variabel jumlah. Menurut perspektif tersebut, *power* masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif. Logikanya pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (*powerful*). Dengan pengertian lain, kelompok miskin dapat berperan sebagai agen pembangunan. Craig dan Mayo (1995) menyatakan bahwa, pemberdayaan akan semakin menjadi masalah bila secara konseptual bersifat *zero-sum*, maksudnya proses pemberdayaan itu dibarengi dengan adanya *power*, sebagai kemampuan seseorang/individu/kelompok untuk mewujudkan keinginannya, kendatipun merugikan yang lainnya.

Kartjono (1988), menyatakan bahwa masyarakat harus diberdayakan, karena masih mencerminkan adanya kelemahan dan kekurangan dalam keswadayaan, kemandirian, partisipasi, solidaritas sosial, keterampilan, sikap kritis, sistem komunikasi personal, wawasan transformatif, rendahnya mutu, dan taraf hidup. Permasalahannya adalah bagaimana memperkuat kemampuan masyarakat lapisan bawah yang masih berada dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan, keterbelakangan, dan sangat membutuhkan pertolongan agar lebih berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, partisipasi dan demokrasi (Priyono 1995).

Pada hakekatnya partisipasi sosial mengandung makna untuk lebih bermakna dalam proses pembangunan. Partisipasi ini tercantum dalam strategi yang mengusahakan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*) dengan memperlakukan manusia sebagai subjek, dan bukan sebagai objek pembangunan. Menurut Eldrige (1995), bahwa keberdayaan masyarakat merupakan kemampuan dan kebebasan masyarakat untuk membuat pilihan-pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri, atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentu.

Faktor-faktor Penentu Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi pemberdayaan masyarakat nelayan antara lain perilaku pembawa program (*action*), perilaku penerima program (*reaction*), serta stok *existing* modal sosial di dalam komunitas penerima program pemberdayaan.

Perilaku pembawa Program (*Action*)

Menurut Niehoff (1964), integrasi program pemberdayaan masyarakat, antara lain sangat dipengaruhi oleh perilaku pembawa program, yang meliputi: komunikasi (*communication/established*), peran/pencitraan (*role/image created*), demonstrasi (*demonstration/of innovation*), partisipasi yang diperoleh (*participation/obtained*), pemanfaatan budaya tradisional (*utilization of traditional culture*), pemanfaatan lingkungan (*environment utilization of*), penentuan waktu/pemanfaatannya (*timing utilization of*), implementasi yang fleksibel (*flexibility of implementation*), kekontinuan implementasi (*continuity of implementation*), dan pemeliharaan (*maintenance established*).

Perilaku Penerima Program (*Reaction*)

Sedangkan berkaitan dengan perilaku penerima program, Niehoff menyatakan bahwa integrasi program pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh: 1) motivasi (*motivation*), yang meliputi kebutuhan yang dirasakan (*felt need*): manfaat praktis yang akan diperoleh (*practical benefit*), meningkatkan gengsi (*prestige emulation*), persaingan (*competition*), penghargaan (*reward*), dan sebagai sesuatu hal yang baru (*novelty*); 2) Budaya setempat (*traditional culture*), yang terdiri dari: a) struktur sosial (*social structure*) meliputi: peran individu (*role-individual*), status individu (*status-individual*) di dalam masyarakat, kekerabatan (*kinship*), kelas kasta (*caste-class*), etnik (*ethnic*), politik (*political*), kewenangan pusat (*central authority*), kepentingan (*vested interest*), dan kepemimpinan (*leadership*), serta persaudaraan dalam keagamaan (*religious fraternity*); b) pola ekonomi masyarakat setempat (*economic pattern*); c) kepercayaan (*beliefs*), meliputi: agama (*theological*), aliran kepercayaan (*magical*), kesehatan (*medical*), pasrah pada keadaan (*realistic fatalism*), dan menganggap proyek sebagai hal yang negatif (*project negativism*); d) pola rekreasi (*recreation pattern*); e) pola konsumsi (*consumption pattern*); dan 3) sistem nilai (*value system*) masyarakat.

Modal Sosial Penerima Program

Umumnya modal sosial didefinisikan sebagai suatu kumpulan norma, jaringan, dan organisasi dengan mana orang-orang mendapatkan akses terhadap kekuasaan dan sumberdaya, sebagai alat yang memungkinkannya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan (Coleman 1988). Indikator output dari modal sosial adalah adanya aksi kolektif yang dapat terjadi karena adanya modal sosial struktural dan modal sosial kognitif sebagai input, sehingga terbangun harapan yang menuntun perilaku kerjasama, yang menghasilkan manfaat bersama dari aksi kolektif itu (Uphoff 2000).

Dari perspektif modal sosial, upaya untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dapat dicapai melalui kerjasama yang lebih baik antar warga di dalam suatu komunitas, antar komunitas, serta antar komunitas dengan pemerintah daerah dan antara komunitas dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Modal sosial terdiri atas dua bentuk, yaitu unsur-unsur struktural (berkaitan dengan jaringan, peran, aturan/norma, dan keteladanan) yang harus dinilai secara terpisah dari unsur-unsur kognitif (berhubungan dengan norma, nilai, sikap, dan keyakinan). Modal sosial struktural menurut Uphoff (2000) adalah relatif obyektif dan secara eksternal dapat terlihat dari struktur sosial, seperti jaringan asosiasi, dan kelembagaan, dan aturan serta prosedur yang ada di dalamnya. Modal sosial kognitif lebih subyektif dan unsur-unsurnya tidak kelihatan seperti kebiasaan yang berlaku umum, norma-norma di dalam berperilaku, nilai-nilai bersama, hubungan timbal balik, dan kepercayaan. Apabila unsur-unsur modal sosial kognitif mempengaruhi/mengarahkan orang pada aksi kolektif yang menghasilkan manfaat bersama, unsur-unsur struktural dari modal sosial berperan di dalam memperlancar/memfasilitasi aksi kolektif itu. Dimensi-dimensi dari modal sosial struktural dan kognitif harus dikombinasikan untuk mewakili potensi agregat dari aksi kolektif yang mendatangkan manfaat bersama bagi suatu komunitas (Grootaert & van Bastaeler 2002).

Inti dari pandangan Narayan (1999) dalam kaitan dengan program pemberdayaan masyarakat nelayan adalah kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumberdaya perikanan (diukur dari penggunaan alat tangkap yang tidak merusak sumberdaya perikanan) dapat tercapai apabila pemerintah daerah berfungsi efektif dan ikatan lintas komunitas atau kelompok di wilayah pesisir dapat memainkan peran sebagai komplementer dan bukannya substitusi dari pemerintah. Untuk itu diperlukan modal, yaitu modal sosial pada level masyarakat (*civil social capital*). Oleh sebab itu, keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat adalah terintegrasinya program di dalam struktur sosial masyarakat penerima program.

METODOLOGI PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat pada dasarnya tidak hanya terukur dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek saja, tetapi perlu memperhatikan keberlanjutan dari pencapaian kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, maka keberhasilan program pemberdayaan masyarakat seharusnya dipandang sebagai terintegrasinya program tersebut di dalam struktur sosial masyarakat penerima program.

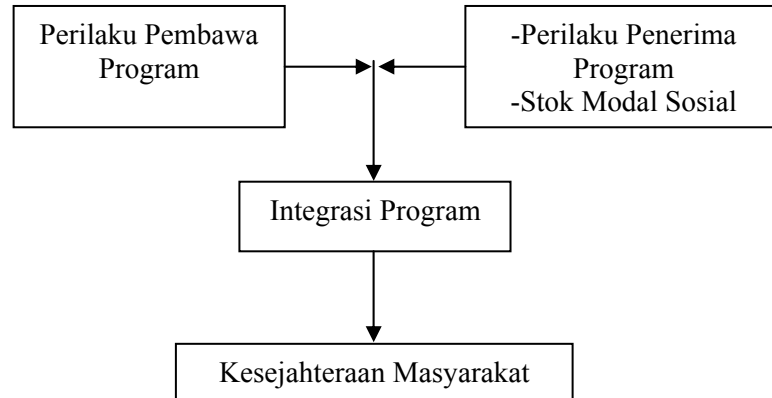
Integrasi program pemberdayaan sangat ditentukan oleh determinan pemberi program, determinan penerima program, serta stok modal sosial yang terdapat di suatu wilayah. Menurut Niehoff (1964), keberhasilan integrasi sangat ditentukan oleh interaksi antara tindakan (*action*) yang dilakukan oleh pembawa program (*behavior of innovator*) dan reaksi (*reaction*) penerima program (*behavior of recipients*). Bila integrasi terjadi dengan baik maka program pemberdayaan berhasil, dalam arti terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelanjutan proyek terjamin.

Konsep mobilisasi modal sosial dapat diterapkan untuk menjelaskan dampak integrasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Lin 2001). Dalam pernyataan negatif, Grootaert dan Bastelaer (2002) menegaskan bahwa informasi yang tidak sempurna merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan dan memanfaatkan stok modal sosial sehingga dapat memperbesar peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dapat meningkatkan partisipasi individu di dalam jaringan sosial dan sikap saling percaya untuk dapat mengurangi biaya informasi, meningkatkan akses terhadap informasi dan sumberdaya, serta dapat mengontrol perilaku menyimpang dari individu. Secara empirik, Grootaert *et al* (1999) menunjukkan bahwa stok modal sosial yang meliputi kepadatan organisasi, heterogenitas keanggotaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan berkorelasi positif dengan kesejahteraan rumahtangga.

Interaksi antara aksi dan reaksi akan menghasilkan integrasi, artinya program pemberdayaan betul-betul diterima menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat, karena adanya stok modal sosial yang tertambat di dalam struktur sosial, yang dapat memfasilitasi dan mengarahkan aksi kolektif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sedemikian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Coleman (1988), yang menyatakan bahwa modal sosial terdiri atas aspek struktur sosial, dan struktur sosial itu dapat berfungsi dalam memfasilitasi tindakan tertentu dari aktor di dalam struktur sosial itu. Artinya integrasi akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, apabila integrasi tersebut dapat berfungsi dalam memfasilitasi dan menuntun tindakan penerima dan pembawa program ke arah peningkatan kesejahteraan.

Karena itu, diduga bahwa perilaku pembawa program, dan perilaku penerima program berpengaruh terhadap integrasi, yang kemudian berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan

masyarakat apabila tersedia stok modal sosial yang memadai. Secara skematik, kerangka pemikiran disajikan di dalam Gambar 1.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis utama penelitian ini adalah pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan pendekatan *bottom-up* di Kecamatan Taniwel lebih terintegrasi sehingga memberikan dampak yang lebih baik terhadap tingkat kesejahteraan rumahtangga nelayan daripada di Kecamatan Waesala dengan pendekatan *top-down*.

Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan (bulan Agustus sampai dengan bulan November 2005) di Kecamatan Taniwel, dan Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram bagian Barat. (Lampiran 1)

Metode Penarikan Contoh

Penarikan contoh dilakukan secara sengaja dari populasi nelayan pancing tunda yang mengikuti program pemberdayaan, jumlah sampel masing-masing adalah 20 orang di Kecamatan Waesala yang tersebar di dua desa/dusun dan 20 orang di Kecamatan Taniwel yang tersebar di empat desa/dusun

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Sedangkan data sekunder di peroleh dari instansi yang terkait, yaitu Kantor Kecamatan, Dinas Perikanan dan Kelautan SBB, BPS Provinsi Maluku, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tim Mitra Kerja Teknis Program Keberdayaan Masyarakat (LSM TKMT PKM) Wilayah Maluku.

Metode Analisis Data

Analisis dimulai dengan analisis deskriptif terhadap perilaku pembawa program dan perilaku penerima program dengan mengacu kepada indikator dari Niehoff (1964), kemudian menghitung indeks komposit modal sosial untuk mengetahui stok modal sosial masyarakat penerima program (Lampiran 2 dan Lampiran 3) dan dilanjutkan dengan analisis regresi model logit yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh integrasi program pemberdayaan masyarakat nelayan dan stok modal sosial masyarakat terhadap peluang peningkatan kesejahteraan rumahtangga nelayan. (Lampiran 4)

Definisi Operasional

- a. Komunikasi (*communication/established*) adalah upaya pembawa program untuk melakukan komunikasi dengan penerima program pada tahap perencanaan dan implementasi program.
- b. Peran/pencitraan (*role/image created*) adalah upaya pembawa program untuk menciptakan citra (*image*) agar program yang dibawa dapat diterima oleh masyarakat yang akan dituju (penerima program), yang dilihat dari kemampuan berbahasa, pemahaman terhadap budaya lokal, serta kemampuan teknis dan administrasi.
- c. Demonstrasi (*demonstration/of innovation*) adalah tindakan pembawa program untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat penerima program mengenai bagaimana cara penggunaan alat yang dipakai (peragaan) dalam program tersebut.
- d. Partisipasi (*participation/obtained*) adalah tingkat keterlibatan penerima program sesuai dengan keinginannya atau terpaksa di dalam perencanaan program dan implementasinya.
- e. Budaya tradisional (*Traditional culture, utilization of*) adalah tingkat adaptasi program yang dibawa oleh pembawa program dengan budaya lokal atau kebiasaan masyarakat yang ada.
- f. Lingkungan (*Environment, utilization of*) adalah kemampuan pembawa program untuk menentukan masyarakat/orang di dalam program ini harus sesuai dengan kebutuhan, dan kemauan yang diharapkan, atau masyarakat yang telah menekuni kegiatan sesuai program.
- g. Penentuan waktu (*Timing, utilization of*) adalah kemampuan pembawa program untuk menentukan waktu yang tepat dan disesuaikan dengan budaya lokal yang telah ada di lokasi program.
- h. Fleksibel (*Flexibility of, implementation*), adalah fleksibilitas pembawa program di dalam mengimplementasikan acuan program, apabila terjadi situasi yang tidak memungkinkan untuk diteruskan.
- i. Kekontinuan (*Continuity of implementation*), adalah pembawa program harus konsisten untuk tetap melaksanakan program pada suatu unit usaha.
- j. Pemeliharaan (*Maintenance, established*) adalah kemampuan pembawa program untuk memelihara atau menjaga biaya hidup, karena dalam kenyataannya menjadi kendala dikemudian hari atau jaminan hidup dengan adanya program ini.
- k. Motivasi (*motivation*) adalah keputusan dari masyarakat penerima program, meliputi kebutuhan yang diperlukan (*felt need*), manfaat yang praktis yang dirasakan (*fractical benefit*), dapat meningkatkan gengsi (*prestige emulation*), akan terjadi persaingan di dalam berusaha (*competition*), program yang diterima merupakan sebagai penghargaan (*reward*), dan yang diterima dianggapnya sebagai sesuatu hal yang baru (*novelty*).
- l. Budaya tradisional (*traditional culture*) adalah struktur sosial, pola ekonomi masyarakat setempat (*economic pettern*), kepercayaan (*beliefs*), meliputi: agama (*theological*), aliran

kepercayaan (*magical*), kesehatan (*medical*), pasrah pada keadaan (*realistic fatalism*), dan menganggap proyek sebagai hal yang negatif (*project negativism*), pola rekreasi masyarakat (*recreation pattern*), pola konsumsi masyarakat (*consumption pattern*).

- m. Sistem nilai (*value system*) adalah hal-hal yang benar dan pantas, serta sebaliknya yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat.
- n. Modal sosial adalah kekuatan sosial yang terdapat di dalam suatu komunitas desa atau dusun, tertambat pada struktur sosial mikro, yang telah dimanfaatkan atau telah dinilai sebagai modal oleh individu-individu di dalam sebuah rumahtangga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rumahtangganya sendiri maupun untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di wilayah kecamatannya.
- o. Dimensi struktural adalah asosiasi lokal dan peranan komunitas di dalam meningkatkan kesejahteraan rumahtangganya dan mengatasi masalah yang dihadapi rumahtangga-rumahtangga yang berada di dalam sebuah komunitas desa atau dusun.
- p. Dimensi kognitif adalah pengetahuan individu-individu di dalam sebuah rumahtangga mengenai kekuatan sosial yang terdapat di dalam komunitasnya yang dapat dijadikan modal untuk membangun kepercayaan, kerjasama, kesetiakawanan, serta menyelesaikan konflik di dalam komunitas desa atau dusun.
- q. Aksi kolektif adalah output dari pemanfaatan maupun pengetahuan individu-individu di dalam sebuah rumahtangga mengenai kekuatan-kekuatan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum kedua kecamatan penelitian yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, kepala keluarga, dan keluarga miskin, tingkat pendidikan, kesehatan, penerangan listrik, dan tingkat pendapatan, disajikan pada Tabel 1.

Tampak bahwa walaupun luas wilayah kecamatan Taniwel lebih besar daripada kecamatan Waesala namun jumlah penduduk dan rumahtangga di kecamatan Taniwel lebih rendah. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau jumlah keluarga miskin di kecamatan Waesala lebih tinggi daripada di kecamatan Taniwel.

Tabel 1. Beberapa Indikator Potensi Wilayah Kecamatan Waesala dan Kecamatan Taniwel, Tahun 2003.

No	Indikator Potensi Wilayah	Kecamatan Taniwel		Kecamatan Waesala		Total Kabupaten
		Jumlah	Proporsi terhadap Kabupaten (%)	Jumlah	Proporsi terhadap Kabupaten (%)	
1	Luas wilayah (Km)	678.52	16.77	250.12	6.18	4 046.35
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	16864	11.36	28837	19.42	148465
3	Jumlah Kepala Keluarga	3714	3.09	5551	4.61	120353
4	Keluarga Miskin (KK)	2542	3.02	4476	5.32	84072
5	Pendidikan :					
	5.1. Murid SD	2800	3.28	4294	5.03	85348
	5.2. Guru SD	234	5.09	150	3.26	4597
	5.3. Ratio Murid terhadap Guru	11.96	0.64	28.63	1.54	18.57
	5.4. Ruang kelas	130	5.59	79	3.40	2325
	5.5. Rata-rata murid Kls	22	59.46	54	145.95	37
6	Kesehatan :					
	6.1. Puskesmas	2	4.26	4	8.51	47
	6.2. Puskesmas Pembantu	8	4.55	4	2.27	176
	6.3. Dokter	2	4.17	1	2.08	48
	6.4. Bidan	29	5.02	6	1.04	578
	6.5. Perawat	22	5.15	6	1.41	427
	6.6. Pasien	3151	2.33	6023	4.45	135202
	6.7. Gizi buruk	302	3.50	454	5.27	8622
	6.8. Air bersih (Leding)	3714	0.52	0	0.00	711642
7	Penerangan listrik (KK)	1057	1.77	0	0.00	59694
8	Pendapatan Perkapita (Rp)	1082704	39.27	700869	25.42	2757000

Sumber: Kabupaten SBB Dalam Angka Tahun 2004.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan dan penerangan di Kecamatan Taniwel lebih baik daripada di kecamatan Waesala. Hal ini tampaknya berkaitan erat dengan tingginya tingkat pendapatan rata-rata di kecamatan Taniwel dan Waesala

Gambaran tentang potensi dan produksi sektor perikanan di kecamatan Waesala dan Taniwel di sajikan dalam Tabel 2. Tampak bahwa produksi perikanan di kecamatan Waesala lebih tinggi daripada di Taniwel. Hal ini sejalan dengan banyaknya jumlah nelayan dan armada penangkapan ikan (Tabel 3) di kecamatan Waesala yang lebih tinggi daripada di Kecamatan Taniwel. Perikanan budidaya tangkap ternyata lebih berkembang di Kecamatan Taniwel daripada di Kecamatan Waesala.

Tabel 2. Jumlah Nelayan dan Produksi Hasil Perikanan di Kecamatan Waesala dan Kecamatan Taniwel Tahun 2004.

No	Usaha Perikanan	Kecamatan Waesala		Kecamatan Taniwel		Total	
		Nelayan (Org)	Produksi (Ton)	Nelayan (Org)	Produksi (Ton)	Nelayan (Org)	Produksi (Ton)
1	Penangkapan	3,737	3,290.40	345	349.6	4,082.00	3,640.00
	a. Penangkapan Laut	3,737	3,290.10	345.00	348.25	4,082.00	3,638.35
	b. Penangkapan Umum/campuran	0	150	0	400	0.00	550
2	Budidaya	155	0.5	0	1.1	155.00	1.6
	a. Kolam/Tambak	155	0.5	0	0.5	155.00	1
	b. Rawa/telaga	0	-	0	0.3	0.00	0.3
	c. Sungai	0	-	0	0.3	0.00	0.3
	Jumlah	3,892	3,290.90	345.00	350.7	4,237.00	3,641.60

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten SBB Tahun 2004

Kondisi ini tampaknya berkaitan erat dengan kondisi sosial budaya di kedua kecamatan tersebut,

Tabel 3 Jumlah Armada Penangkapan Ikan menurut Ukuran di Kecamatan Waesala dan Kecamatan Taniwel, tahun 2004

Kecamatan	Perahu Tanpa Motor				Motor Tempel		Kapal Motor (GT)				Total
	Jukung	Kecil	Sedang	Besar	Yamaha	Katinting	1-10	11-19	20-30	35-50	
Waisala	1.666	1.032	504	46	79	569	19	2	-	-	3.917
Taniwel	150	45	19	-	2	10	150	45	19	-	440
Jumlah	1.816	1.077	523	46	81	579	169	47	19	-	4.357

Sumber: Kabupaten SBB Dalam Angka Tahun 2004

Kecamatan Taniwel

Desa-desanya di Kecamatan Taniwel dapat digolongkan atas desa pegunungan dan desa pantai. Sebagian masyarakat yang kini bermukim di desa/dusun pantai, berasal dari desa pegunungan, karena secara adat wilayah desa pantai masih termasuk hak ulayat dari desa pegunungan. Oleh karena itu, keterkaitan keluarga di antara masyarakat desa/dusun pantai dan desa pegunungan sangat tinggi. Terbentuknya beberapa desa/dusun pantai baru merupakan desa/dusun transmigrasi (*resettlement*) lokal (dari desa pegunungan ke desa/dusun pantai) yang

dilakukan oleh Kantor Wilayah Transmigrasi Provinsi Maluku, dan desa/dusun penempatan pengungsi pada saat kerusuhan 1999, yang terletak di sisi jalan raya lintas utara Pulau Seram.

Secara historis, terjadinya pemisahan antara masyarakat desa pegunungan dan desa pantai erat kaitannya dengan masa penjajahan dan masuknya agama Nasrani di Maluku. Dewasa ini hal ini sangat terkait dengan jenis pekerjaan dari sebagian besar penduduk, yaitu sebagai pegawai negeri sipil (PNS), tentara maupun polisi, yang telah terbiasa dengan kehidupan perkotaan. Dengan demikian mata pencaharian masyarakat di daerah ini lebih beragam daripada di Kecamatan Waesala.

Adat istiadat yang masih melekat pada masyarakat di Kecamatan Taniwel adalah ikatan gandong (saudara dari leluhur yang terpisah dan tinggal di desa lain) atau pela (saudara antar desa yang terbentuk karena pada waktu dulu nenek moyang mereka mengangkat atau mengaku sebagai bersaudara, karena ada yang merasa ditolong dan tertolong sedemikian sehingga mereka berjanji dan bersumpah dengan meminum air/darah mereka atau darah binatang yang dikorbankan), walaupun mereka tidak seiman/seagama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam upacara panas (acara kumpul bersama) gandong/pela yang sering saling berkunjung ke desa lain atau secara bergantian datang ke desa asal mereka yakni pada waktu upacara pernikahan, sunatan bagi yang Muslim, sidi bagi yang Kristiani, serta merayakan hari-hari keagamaan dengan saling berkunjung satu sama lainnya.

Kelembagaan adat untuk pengelolaan sumberdaya alam adalah "sasi" dan yang bertindak sebagai pelaksana disebut "kewang". Tugas dari kewang ini yang menjaga masa panen bagi tanaman tahunan seperti kelapa, sagu, damar, rotan, buah-buahan, baik milik pribadi maupun milik Negeri/Adat setempat agar hasil yang akan dipanen telah memenuhi syarat seperti matang, tidak merusak siklus, serta dapat dinikmati secara bersama-sama. Sedangkan untuk hasil laut berupa ikan lompas untuk umpan, lola, teripang, terumbu karang dan yang lainnya, serta menjaganya dari ancaman bom dan potas (pembusuan) oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sering mengambil hasil laut dengan jalan pintas di wilayah kekuasaan adat setempat.

Adat "sasi" ini telah kental dengan kehidupan masyarakat setempat, karena apabila wilayah yang telah di jadikan tempat "sasi" maka siapapun akan takut untuk mengambil/memanen, walaupun buah sudah matang dan jatuh, karena nilainya sangat sakral. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan wilayah (kebun/dusun) seseorang kalau sudah termasuk pada areal "sasi", maka orang yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil/panen pada saat/masa "sasi" berlaku, dimana berakhirnya saat/masanya yaitu enam bulan sampai satu tahun baru masyarakat secara gotongroyong untuk diambil/dipanen dan selanjutnya baru dijual kepada masyarakat setempat atau pihak lain. Kebiasaan pelaksana "sasi" ini dikelola oleh "negeri/desa" dan atau "gereja", dimana hasilnya akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu "negeri/desa" yang sering menjalankan "adat sasi" ini adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat Muslim untuk melakukannya.

Peran gender di wilayah sangat besar, terutama dalam bidang pemasaran, pengolahan hasil perikanan tangkap berupa pengasapan, pengolahan tepung sagu untuk dimakan/dijual guna

mencukupi kebutuhan keluarga, yaitu untuk biaya pendidikan anak-anak, baik yang mengikuti pendidikan di kampung maupun di Kota Ambon. Hasil tangkapan pancing tunda dan jaring pukat dibeli oleh ibu-ibu yang berprofesi sebagai jibu-jibu yang kemudian menjualnya ke pasar atau ke wilayah pegunungan dan desa-desa tetangga.

Selain kontribusi ibu-ibu dalam keluarga, mereka juga terlibat dalam wadah PKK, pos yandu, kelompok keagamaan, serta kelompok adat setempat berupa tarian dan lain-lain aktivitas yang apabila upacara adat berlangsung di desa sendiri ataupun di desa/tempat lain. Kebiasaan pelaksanaan adat tersebut berkaitan dengan upacara pelantikan Raja/Kepala Desa, panas gandong/pela, penyambutan tamu para pejabat, baik dalam kunjungan, maupun pelantikan pejabat serta pengresmian gedung-gedung milik pemerintah, rumah ibadah dan acara resmi lainnya.

Kecamatan Waesala

Kecamatan Waesala merupakan desa pantai, yang daerah pemukimannya berada di sepanjang garis pantai, baik di daratan Pulau Seram, Buano, Kelang, Manipa, maupun Pulau Kasuari. Di kecamatan ini juga, terdapat desa transmigran dari Desa Alang Pulau Ambon, yaitu Desa Alang Asaude (Asaude adalah dusun dari anak Desa Waesala).

Di kedua dusun penelitian, yaitu dusun Rahai adalah anak Desa Kelang yang berada di Pulau Kelang, dan dusun Pulau Kasuari yang merupakan anak Desa Buano Utara, penduduknya berasal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang telah bermukim lama dari buyut, kakek-nenek dan bahkan telah bersatu dan berkeluarga dengan warga asli Seram. Kediaman mereka ini awalnya sebagai tempat usaha, seperti jasa transportasi (perahu layar) dari Pulau Seram ke Kota Ambon dan sebaliknya, serta bahkan sebagai pedagang antar pulau (Maluku, Sulawesi, Jawa dan lainnya), selain itu usaha nelayan yang hasil dibuat ikan asin, dan lama kelamaan dijadikan sebagai tempat bermukim.

Adat istiadat masyarakat setempat, masih menggunakan adat Melayu/budaya Islami, baik dalam perkawinan, sunatan, dan perayaan hari-hari besar keagamaan sebagaimana lazimnya di daerah lain, sedangkan adat gandong/pela mereka tidak terikat, dan hanya mereka menghormati serta mengikutinya apabila desa induk mereka yang melakukannya.

Kelembagaan "sasi" juga masih sangat dihormati oleh masyarakat setempat baik di darat maupun di laut, terutama oleh masyarakat nelayan. Tetapi wilayah ini sangat rawan terhadap penggunaan bom dan pembiusan (potasium) untuk menangkap ikan, karena jauh dan agak terpencil sehingga sulit untuk terkontrol dari jangkauan petugas kepolisian maupun petugas adat (kewang). Selain itu juga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian sumberdaya perikanan/laut yang sangat rendah.

Dibandingkan dengan di Kecamatan Taniwel peran gender dalam menyokong kebutuhan keluarga sangat terbatas. Sebagian besar ibu rumahtangga aktif melakukan penggarapan ikan (pembuatan ikan asin), bila musim ikan ekor kuning tiba. Hanya sedikit yang membuka usaha dagangan di rumahnya. Selain itu, ada juga ibu-ibu yang aktif mengikuti kelompok PKK, pengelola pos yandu dan pengajian ibu-ibu, terutama yang berada di lokasi Pulau Kelang,

sedangkan di Pulau Kasuari hanya kelompok pengajian saja, karena jauh dari desa dan agak terpencil.

Dengan demikian penghasilan utama keluarga adalah usaha nelayan, baik untuk kebutuhan sehari-hari, sandang dan papan maupun pendidikan anak serta yang lainnya. Apabila musim barat tiba baru mereka melakukan pekerjaan lain, berupa berkebun dan mengambil hasil kebun, dan kalau bertepatan dengan musim cengkih maka mereka ikut panen cengkih, mengambil kayu bakar dan keperluan rumahtangga lainnya.

Pola Pemberdayaan

Perbedaan pola pemberdayaan di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala penelitian adalah sebagai berikut:

Kecamatan Taniwel

Program pemberdayaan yang berlangsung di Kecamatan Taniwel adalah berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait dengan bantuan penanggulangan konflik kemanusiaan di Maluku. Selanjutnya mendampingi masyarakat untuk melakukan inventarisasi kegiatan dengan menggunakan perencanaan partisipatif (mencari faktor-faktor penentu kegiatan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan), maka lahirlah gagasan dari masyarakat untuk mengadakan kegiatan usaha pancing tunda. Setelah program dicanangkan, barulah pendamping Tim Mitra Kerja Teknis (TMKT) Wilayah Maluku dan masyarakat membuat proposal untuk diusulkan pada donatur yang dalam hal ini adalah United Nation Development Programme (UNDP) melalui LSM Nasional yaitu Program Keberdayaan Masyarakat (PKM).

Proses penentuan program kegiatan yang diajukan kepada UNDP (Donatur) direncanakan secara partisipatif yakni melibatkan masyarakat pancing tunda sebagai subyek utama penerima dan pelaksana program pemberdayaan, sehingga pola pendekatan pemberdayaan masyarakat nelayan di kecamatan Taniwel tersebut dikategori sebagai pola pendekatan "dari bawah" (*bottom-up*). Seiring dengan paradigma otonomi daerah, maka pendekatan pemberdayaan masyarakat pola *bottom-up* sudah menjadi suatu keharusan, tetapi untuk melaksanakannya tidaklah mudah, oleh karena itu dilakukan pendampingan oleh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) sebagai salah satu *stakeholders* mitra pemerintah, yang berkewajiban memfasilitasi dan mendampingi masyarakat terutama berperan dalam proses pengembangan kapasitas stok modal sosial di tingkat masyarakat lokal, sekaligus menjembatani dalam proses integrasi pendekatan pembangunan pola *top-down* dan *bottom-up* yang sinergis bagi kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang memberikan perhatian terhadap upaya pemberdayaan stock *existing* modal sosial masyarakat nelayan kecamatan Taniwel adalah LSM yang menamainya Tim Mitra Kerja Teknis (TMKT) Program keberdayaan masyarakat (PKM) Wilayah Maluku, yang mulai berkiprah pada Tahun 2001. LSM tersebut dalam kiprahnya atau aksinya berhasil mengembangkan kapasitas stock modal sosial yang tersedia di kecamatan

Taniwel menjadi suatu wadah *collective action* yang disebut Aliansi Masyarakat Sipil (AMS). AMS berperan sebagai wadah partisipasi kelompok masyarakat nelayan dan juga sebagai mediator dalam menampung dan menyalurkan aspirasi kelompok masyarakat nelayan kepada donatur dan sebaliknya sebagai penyalur aksi program dari donatur kepada kelompok masyarakat nelayan sebagai *recipient* yang melaksanakan reaksi program. Sebagai hasil dari reaksi program dari AMS telah terbentuk 23 kelompok masyarakat nelayan pancing tunda yang masing-masing beranggotakan antara 2 sampai dengan 3 nelayan pada Tahun 2003.

Dalam implementasinya, proses pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Taniwel dilaksanakan melalui tahapan-tahapan: 1) proses pelaksanaan, yaitu kegiatan sosialisasi dan identifikasi kepada calon anggota kelompok yang berminat, sekaligus menggarap proposal dengan pendamping, 2) persiapan kelompok yang dilakukan adalah menyangkut identifikasi dan sosialisasi dengan calon kelompok yang telah bersedia, 3) pelaksanaan pelatihan kelompok yang telah dinyatakan siap, meliputi manajemen kelompok dan keuangan, 4) dana bergulir yang diharuskan oleh anggota kelompok adalah yang telah disepakati bersama dan pengembaliannya dilakukan sebulan sekali, sesuai hasil yang diperoleh disaat melaut, yang disetor ke Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) AMS, 5) pendampingan kelompok, kegiatan ini dilakukan langsung oleh AMS yang berada di Kecamatan Taniwel dan TMKT PKM Wilayah Maluku yang setiap saat memantau perkembangan yang dilakukan oleh AMS terhadap kelompok nelayan maupun usaha lain.

Kecamatan Waesala

Pola pemberdayaan yang diadakan di Kecamatan Waesala adalah program pemerintah melalui Dinas Perikanan Maluku Tengah pada saat itu, dan belum ada pemekaran kabupaten. Proyek tersebut berupa bantuan fasilitas alat tangkap (perahu dan mesin tempel 25 dan 40 pk) untuk pancing tunda, dimana Pulau Kelang mendapat jatah sebanyak 24 kelompok sedangkan di Pulau Kasuari 17 Kelompok. Berdasarkan program yang diadakan oleh pemerintah, maka pendekan pola ini disebut *top-dwan*.

Mata pencaharian masyarakat di kedua pulau ini 90 persen adalah nelayan, sehingga Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku (Kabupaten induk sebelum pemekaran) memilihnya sebagai lokasi proyek pemberdayaan masyarakat nelayan.

Proyek pemberdayaan ini telah dilakukan sejak tahun 2002-2003, yakni sebanyak 41 kelompok, dimana pada Pulau Kelang sebanyak 24 kelompok, dan di Pulau Kasuari terdapat 17 kelompok. Dari masing-masing kelompok yang telah terbentuk, anggotannya antara 2 sampai dengan 3 orang, tergantung dari kelompok yang menentukannya (orang-orang yang telah terbiasa satu dengan yang lainnya).

Sedangkan pendekatannya adalah proyek, dimana tahapan dan pelaksanaannya tidak sebaik yang telah dilakukan di lokasi Taniwel. Tahapan-tahapan proses yang berada di lokasi Waesala meliputi: 1) proses, yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan hanya menentukan nelayan

yang mau dan yang telah ditentukan, 2) persiapan kelompok yang laksanakan, menyangkut identifikasi dan sosialisasi dengan calon kelompok, berdasarkan calon anggota kelompok yang telah terbiasa dengan usaha pancing tunda saja, 3) kegiatan pelatihan kelompok tidak dilaksanakan, hanya membahas hal-hal teknis dan cara pengelolaan kelompok, dan 4) dana guliran yang dilaksanakan mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama, yaitu pengembaliannya dilakukan sebulan sekali, yang disetor ke Lembaga Ekonomi Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPM3) yang bertempat di Masohi. Hal dimaksud yang menjadi kendala bagi kelompok dalam menyetorkan dana guliran, sebab kelompok nelayan harus ke Masohi atau petugas yang datang dari Masohi, serta 5) kegiatan pendampingan, pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah yang pelaksanaannya oleh Lembaga Ekonomi Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPM3) yang berlokasi di Masohi, dan setelah pemekaranpun pendampingannya tidak dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Seram bagian Barat. Oleh sebab itu, kelompok nelayan yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut sulit berkonsultasi dengan instansi terkait, karena harus ke Masohi untuk mendapat informasi terkait usaha mereka.

Pembahasan menyangkut pola pendekatan program pemberdayaan masyarakat di kedua kecamatan ini akan di analisa mulai dari aspek sosialisasi program, perencanaan program, pelaksanaan program, pendampingan dan pengawasan program. Tahapan-tahapan ini perlu dianalisa karena pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang sifatnya segala keputusan harus berada di tangan masyarakat atau target grup, untuk itu maka pelaku-pelaku pelaksanaan program yang berada di luar masyarakat target harus menjadi fasilitator dan buka sebagai pengambil keputusan. Uraian menyangkut tahapan-tahapan analisa tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Sosialisasi Program

Kegiatan sosialisasi program merupakan salah satu kegiatan untuk menjelaskan maksud dan tujuan program serta aturan main kepada masyarakat, hal ini sangat penting karena dengan sosialisasi dapat diketahui apakah suatu program yang akan dijalankan dapat diterima oleh masyarakat atau tidak, karena gambaran ini menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan mereka/masyarakat yang selama ini dihadapi. Sosialisasi program juga harus dilaksanakan dengan melibatkan semua *stakeholders* agar dalam implementasi program akan lebih mudah dalam kegiatan koordinasi maupun dukungan yang akan diberikan. Selain itu dapat memberi pandangan kepada masyarakat target sehingga mereka akan lebih ikhlas dalam penerimaan program tersebut.

Program Keberdayaan Masyarakat (PKM) yang menggunakan pendekatan partisipatif di dalam pelaksanaan dimulai dari kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi selain melibatkan *stakeholders* masyarakat, juga melibatkan aparat desa dan kecamatan. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa seluruh masyarakat, staf desa dan kecamatan menerima program ini dan akan memberikan dukungan terhadap implementasi program.

Sosialisasi program PKM Wilayah Maluku dilakukan bukan hanya pada tahapan awal saja, tapi juga di tingkat target kelompok grup, dan sosialisasi ini tetap juga dilakukan setelah

kelompok terbentuk. Hal ini bertujuan agar kelompok target tetap memahami tujuan program, sehingga di dalam implementasi program mereka dapat melaksanakannya dengan sepenuh hati, sesuai tujuan yang diamanatkan program tersebut. Sebaliknya sosialisasi tujuan dari program untuk program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah tidak dilakukan lagi.

Untuk program yang dijalankan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah, kegiatan sosialisasi dilakukan secara terbatas dan hanya melibatkan kelompok masyarakat yang menjadi target. Sosialisasi untuk staf desa/kecamatan hanya dilakukan dalam bentuk melapor sehingga mereka tidak mengetahui substansi pelaksanaan program secara menyeluruh. Hasil pengamatan di desa/dusun kecamatan Waesala menunjukkan bahwa ada anggota kelompok yang tidak mengetahui keberadaan program ini, namun dalam pelaksanaannya mereka dilibatkan. Hal ini tentu akan mempengaruhi rasa kepemilikan program dan di dalam pelaksanaannya akan menimbulkan rasa kurang bertanggung jawab terhadap program yang diikutinya. Setelah diwawancarai, anggota peserta program menyatakan bahwa jika program ini tidak akan berjalan baik, itu bukan merupakan tanggungjawabnya, akan tetapi merupakan tanggungjawab Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah dan kontraktor pengadaan sarana.

Mengingat kedua hal ini, maka kedalaman pemahaman program dari kelompok akan berbeda. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman terhadap masing-masing tujuan dan substansi program dari kelompok masyarakat target yang menerima program PKM lebih baik dibanding dengan masyarakat non-target. Sebaliknya, kelompok yang menerima program dari Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah, (lebih dari 50 persen anggota kelompok ini) tidak memahami tujuan program dan substansi program secara keseluruhan, yang menyangkut tanggungjawab mereka dalam program tersebut seperti pengembalian dana yang diperoleh secara kredit.

Secara keseluruhan penjelasan sosialisasi di atas memberi kesan kuat bahwa pada tingkat sosialisasi ini telah terjadi pula suatu tahapan pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada penciptaan kesadaran masyarakat akan adanya bantuan yang ditujukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pemberdayaan penyadaran bagi program yang dijalankan oleh PKM terjadi secara lebih menyeluruh dan cenderung berkesinambungan, dibandingkan dengan program pengadaan oleh Dinas Perikanan Kelautan Maluku Tengah, yang bersifat sangat terbatas di beberapa anggota kelompok dan tidak berkesinambungan.

Dampak penyadaran akibat proses sosialisasi terhadap pelaksanaan program secara lebih baik dan bertanggungjawab tidak akan terjadi dalam jangka waktu yang pendek, tetapi akan menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan program ke depan (jangka panjang). Mengubah perilaku masyarakat memang tidak terjadi dalam waktu yang singkat/pendek dan dengan frekwensi penyadaran yang terbatas atau insidental. Untuk itu proses sosialisasi yang dilakukan program PKM lebih dari satu kali hingga menjangkau kelompok target yang merupakan investasi peningkatan penyadaran yang bersifat jangka panjang. Investasi peningkatan penyadaran tersebut

tentu akan menjadi landasan yang baik bagi pelaksanaan program tahap berikutnya, terutama bagi yang menggunakan pendekatan program yang sama.

Perencanaan Program

Perencanaan yang baik merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam menyiapkan berbagai kebutuhan kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan program. Keterlibatan berbagai *stakeholders* dalam perencanaan merupakan hal-hal yang harus diperhatikan agar kebutuhan dari masyarakat target dapat terakomodasi dan terlaksana dengan baik, keadaan ini juga akan menentukan seberapa besar suatu program yang akan diimplementasi mendapat dukungan dan merasa dimiliki oleh masyarakat target.

Hasil pengamatan menunjukkan terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan partisipasi antara masyarakat yang berbeda. Dilihat dari segi pengumpulan data untuk merumuskan kegiatan yang diperlukan masyarakat, maka pendekatan *top-down* hanya mengandalkan data yang berasal dari kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Diketahui bahwa kegiatan Musrenbang tersebut hanya mengumpulkan data dari tingkat kecamatan dan pelaksanaannya lebih banyak terpusat pada tingkat kecamatan dan kabupaten, sedangkan data tingkat desa banyak yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama yang menyangkut kualifikasi/spesifikasi suatu kebutuhan kegiatan. Pendekatan partisipatif yang dilaksanakan oleh PKM Wilayah Maluku atau AMS Kecamatan Taniwel di dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh masyarakat desa/dusun terutama masyarakat miskin yang menjadi target di dalam pelaksanaan program. Pengamatan dan pengumpulan data dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan metode PRA. Hasil pengamatan kemudian dilakukan dianalisa secara bersama-sama pula, dan dilanjutkan dengan seleksi prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan melalui kegiatan lokakarya desa. Setelah ditetapkan prioritas kegiatan melalui bimbingan fasilitator (pendamping), maka disusunlah proposal secara bersama-sama untuk diajukan ke PKM guna diperoleh dana untuk implementasi. Di tingkat PKM proposal dari berbagai desa/dusun diseleksi dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Proposal yang lolos dalam seleksi ini akan mendapat dukungan dana. Dukungan dana dari program PKM berasal dari donor negara-negara tertentu, seperti Belanda, Inggris, Amerika, serta Selandia Baru.

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Taniwel dan Waesala secara kualitatif maupun kuantitatif berbeda. Secara kualitatif, desa/dusun di Kecamatan Taniwel mendapat pemberdayaan dalam bentuk peningkatan kapasitas dalam bidang perencanaan, karena mereka terlibat langsung, mulai dari pengumpulan data hingga presentasi proposal. Secara kuantitatif, banyak masyarakat yang dilibatkan dalam proses ini, sehingga kesadaran masyarakat akan penyelesaian masalah yang dihadapi dapat diketahui luas sehingga dukungan partisipasi juga diperoleh secara lebih baik. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat di desa/dusun di Kecamatan Taniwel mengetahui keberadaan program ini, dan secara partisipatif bersedia agar program ini diutamakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Sebaliknya di desa/dusun di Kecamatan Waesala banyak

masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan program bantuan armada tangkap yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah. Hal ini disebabkan oleh karena data yang dimanfaatkan berasal dari kegiatan Musrenbang yang pelaksanaannya menggunakan jasa kontraktor, sehingga hanya masyarakat tertentu yang dilibatkan dalam pembagian bantuan. Masyarakat yang terlibat dalam pemberian bantuanpun berasal dari luar masyarakat target. Hasil pendataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui keberadaan program ini kurang dari 30 persen, itupun hanya berada pada desa/dusun yang menjadi target program. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program yang dijalankan oleh PKM yang menggunakan pendekatan partisipatif, memandang masyarakat target sebagai subjek pembangunan, sedangkan pendekatan yang dijalankan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah masih memandang masyarakat target sebagai objek pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa dari perencana dan pelaksana program dari Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah, mereka juga ada yang memakai pendekatan perencanaan program yang bersifat partisipatif. Namun sistem perencanaan yang ada pada instansi tersebut belum bisa mengakomodasikan hal tersebut.

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan suatu program akan mengacu pada prosedur pelaksanaan program yang telah dibuat sebelumnya. Masing-masing program terutama yang berbeda akan memiliki pelaksanaan yang berbeda pula. Perbedaan tersebut menyangkut *stakeholders* yang terlibat, kelembagaan yang terbangun dan aturan main dalam pelaksanaan. Selain itu yang dapat juga perbedaan dalam kriteria-kriteria yang diharapkan untuk pemulihan suatu proposal.

Dilihat dari susunan manajemen pelaksanaan program PKM Wilayah Maluku maupun Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah, maka diperoleh suatu susunan yang sangat berbeda. Untuk program Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah susunan manajemen yang dikehendaki dalam prosedur pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah bertindak sebagai lembaga pemberi dana dan yang memberi asistensi teknis termasuk penyiapan pendamping. Pendamping diseleksi dari masyarakat (LSM, Perguruan Tinggi, maupun dari profesional lainnya).
- Kontraktor. Bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah sesuai prosedur pelaksanaan yang ditetapkan untuk disalurkan melalui kontraktor yang penentuannya melalui tahapan-tahapan tender.
- Pembentukan kelompok target. Diisyaratkan dalam prosedur pelaksanaan bahwa kelompok target yang dibentuk harus memiliki mata pencaharian di bidang nelayan (trampil).

Untuk program PKM, susunan manajemen pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

- PKM yang berkedudukan di Kota Ambon bertindak sebagai fasilitator pelaksana program. Asistensi teknis akan dilakukan oleh kalangan profesional/instansi teknis terkait. PKM juga

melakukan asistensi di bidang penguatan dan administrasi kelompok, serta penguatan pendampingan.

- Di tingkat kecamatan, PKM membentuk kelembagaan yang akan melaksanakan program (regulasi teknis) yang diberi nama Aliansi Masyarakat Sipil (AMS). Kelembagaan ini di dalam pelaksanaannya akan menjalankan tugas teknis, seperti pembentukan kelompok, kegiatan koordinasi, memfasilitasi penguatan kapasitas (*capacity building*) teknis kelompok, manajemen dan administrasi kelompok.
 - Di tingkat kecamatan juga dibentuk Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM). Lembaga ini berfungsi untuk melaksanakan regulasi keuangan, yaitu melaksanakan pemberian kredit, mengumpulkan hasil pengembalian kredit, menggulirkan dana pengembalian ke kelompok yang memerlukan atau yang memenuhi syarat mendapat bantuan. Selain itu juga melaksanakan fungsi manajemen dan administrasi keuangan secara profesional, dan kegiatan ini dilakukan juga dalam bentuk peningkatan kapasitas kepada kelompok target.
 - Di tingkat kecamatan, PKM juga menyiapkan pendamping lokal yang setiap saat berada di lokasi untuk memfasilitasi kegiatan atau memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat target.
 - Pembentukan kelompok di tingkat desa/dusun, dimana kelompok menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program. Seluruh kegiatan kebutuhan kelompok dilakukan sendiri, yang dimulai dari perencanaan, penyusunannya, pemanfaatan, serta pengembaliannya.
- Semua tahapan pembentukan kelembagaan mulai dari kelembagaan AMS dan LKM dilakukan secara partisipatif dan demokratis. Untuk membantu melancarkan tugas dan fungsi dari kedua lembaga ini, maka disusun aturan main yang juga berlangsung secara partisipatif dan demokrasi. Pemilihan atau penunjukkan orang-orang yang duduk dalam kelembagaan AMS dan LKM juga dilakukan secara partisipatif, transparan, dan demokrasi.

Mengacu pada penjelasan kedua susunan manajemen tersebut, dapat diketahui bahwa susunan dan manajemen pengolahan program yang dilaksanakan oleh PKM lebih terfokus untuk menjadikan masyarakat target sebagai pengelola program. Di sini perencanaan pelaksanaan program pengambilan keputusan dan pembelanjaan kebutuhan kegiatan penentuan aturan main pelaksanaan maupun pengembalian kredit dikelola dan diputuskan oleh masyarakat sendiri. Gambaran ini memperlihatkan bahwa adanya suatu upaya yang jelas dari PKM untuk benar-benar memberdayakan kapasitas masyarakat tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga dari aspek manajemen dan administrasi program. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Taniwel yang dari segi perencanaan pengelolaan manajemen kelompok maupun administrasi program masih tergolong sangat lemah atau bahkan selama ini mereka tidak pernah mengetahuinya. Masyarakat yang menjadi target di dalam program PKM mendapat peningkatan kapasitas teknis dari para profesional atau staf instansi teknis terkait yang disiapkan oleh PKM. Untuk peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan program, masyarakat memperolehnya dari kelembagaan AMS yang dibangun oleh PKM. Lembaga keuangan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan program oleh PKM berbasis kepada keberlanjutan program, bahkan pada orientasi

output yang jika proyek selesai, juga kegiatan di tingkat masyarakat selesai. Untuk memudahkan pengorganisasian bantuan dan mengatasi berbagai kekurangan pada anggota kelompok, maka PKM juga membentuk kelompok yang akan mengelola suatu program. Kelompok-kelompok tersebut senantiasa didampingi oleh pendamping lokal yang akan memfasilitasi penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi.

Susunan yang dikembangkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah lebih memanfaatkan masyarakat target sebagai objek program, hal ini terlihat pada aturan main yang ada, ditentukan oleh dinas dan kontraktor. Kegiatan yang dilakukan oleh pendamping juga bersifat insidental dan tidak berada di lokasi kegiatan program. Gambaran ini mengindikasikan bahwa keseriusan program dalam peningkatan kapasitas masyarakat target sangat rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa usaha-usaha untuk membuat program keberlanjutan dari pengelolaan tidak tampak. Pengamatan di lapangan memperlihatkan bahwa dari 41 kelompok yang dibentuk, yang masih aktif menjalankan usaha hanya tersisa 41,48 persen saja, itupun sebagian kelompok sudah tidak terlalu aktif, karena masalah teknis operasional usaha yang sering terganggu berupa gangguan kerusakan mesin. Kondisi ini terbalik dengan yang ada di Kecamatan Taniwel, dimana dari 23 kelompok yang dibentuk, hanya dua kelompok saja yang telah ditarik dari kelompok oleh AMS, karena kelompok yang bersangkutan tidak aktif melaut, karena usaha lain yang ditekuninya. Perkembangan kelompok tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Kelompok Nelayan Pancing Tunda dan Keberlanjutan Keaktifan Kelompok Tahun 2002-2005.

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Nelayan		Keterangan (%)
		Awal 2002	Akhir 2005	
1	Taniwel	23	21	91,13 Aktif
2	Waesala	41	17	41,48 Aktif

Sumber : olahan data primer 2006

Hasil lain yang diperoleh dari pendekatan yang dilakukan oleh program PKM adalah munculnya kelompok-kelompok baru yang dibiayai dari dana pengembalian kelompok. Kelompok baru tersebut adalah kelompok jibu-jibu (kelompok Ibu-Ibu yang membeli hasil tangkapan nelayan pancing tunda) dan kelompok pengasapan ini membeli hasil tangkapan yang lebih segar untuk dijadikan ikan asapan untuk di jual ke pasar atau ke masyarakat setempat. Sejak awal sosialisasi program PKM melibatkan seluruh masyarakat, termasuk para ibu rumah tangga. Selain itu, maka para ibu-ibu juga dilibatkan dalam perguliran program. Dengan demikian maka program ini juga mempertimbangkan aspek *gender*.

Pendampingan Program

Pendampingan program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program hingga pasca pelaksanaan program. Program yang tanpa pendampingan dalam kondisi masyarakat yang masih labil dalam pengelolaan keuangan, akan

memudahkan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana, baik oleh pengelola maupun penerima bantuan. Pendampingan kalau dilihat dari keberadaannya dibedakan atas pendampingan lokal dan pendampingan yang tidak berada di lokasi target program. Kedua jenis pendampingan ini akan berbeda di dalam menjalankan tugas dan penerimaannya oleh masyarakat. Keberadaan pendampingan lokal yang setiap saat berada di lokasi kegiatan dan berasal dari daerah setempat, secara penuh dapat diterima oleh masyarakat di lokasi target. Sedangkan pendamping yang berasal dari luar lokasi dan tidak setiap saat berada di lokasi target, tidak selalu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk beradaptasi.

Program perikanan yang dijalankan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah, menyiapkan pendamping yang berasal dari luar lokasi dan mereka juga ditempatkan di Masohi (ibu kota kabupaten). Keberadaan mereka di lokasi target bersifat insidental, karena disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemanfaatan surat perintah jalan (SPJ) dari Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah. Hasil wawancara dengan kelompok penerima bantuan dari program Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah menunjukkan bahwa keberadaan pendamping di lapangan disesuaikan dengan jadwal waktu pengumpulan dan pengembalian kredit. Di sini terlihat bahwa pendamping yang disiapkan tidak berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kapasitas kelompok, baik secara teknis, pengorganisasian kelompok maupun dalam pengelolaan administrasi kelompok, sehingga tidak teratur dan tidak memenuhi syarat minimal pembukuan. Sedangkan untuk PKM semua hal tersebut dijalankan dengan cukup baik, baik oleh PKM, pendamping maupun AMS dan LKM.

Pengawasan Program

Pengawasan program merupakan bagian dari kegiatan program yang bertujuan untuk melihat sejauhmana program telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan. Pengawasan dapat bersifat internal dan eksternal. Pengawasan yang bersifat internal biasanya dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan atau memfasilitasi pelaksanaan program. Sedangkan pengawasan eksternal biasanya dilaksanakan oleh lembaga profesional di bidang pengawasan dan bersifat independen.

Realita menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh PKM dan Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah sangat berbeda. Pengawasan yang dilakukan oleh program PKM bersifat internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh staf PKM dengan mengacu pada penggunaan keuangan setelah dua bulan pelaksanaan, dan pengawasan secara kontinyu dilakukan oleh pendamping. Selain pengawasan internal PKM juga melaksanakan pengawasan eksternal, baik yang berasal dari PKM pusat di Jakarta maupun UNDP sebagai donor dana perwalian (*Trust Fund Donor*). Ketatnya pengawasan ini, menyebabkan seluruh perencanaan program yang telah disusun berlangsung dengan baik tanpa adanya penyelewengan atau penyimpangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah juga bersifat internal, namun dalam pelaksanaannya hanya melihat aspek *output*-nya, dalam hal ini, keberadaan barangnya atau jenis bantuannya, dan tidak memperhatikan aspek proses dan dampak (*outcome*)-nya. Sebaliknya pengawasan eksternal tidak dilakukan, kecuali jika ada laporan tentang adanya penyalahgunaan bantuan.

Perbedaan pengawasan tersebut di atas, menggambarkan bahwa pengelola program PKM secara sungguh-sungguh ingin menanamkan kedisiplinan dan kejujuran di dalam pengelolaan program. Hal ini diharapkan akan menjadi modal sosial yang sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam mengelola dana yang berasal dari swadaya maupun dari luar. Untuk pengawasan program, Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah terkesan hanya melakukan sekedar untuk memenuhi syarat administrasi saja. Dengan demikian peningkatan kedisiplinan dan kejujuran para peserta program terasa tidak kuat. Hal ini tentu akan memberi dampak buruk bagi keberlanjutan program ini dan pengelolaan program lainnya.

Salah satu perbedaan yang sangat kontras adalah dalam kegiatan pengawasan untuk program PKM yang menunjukkan adanya kesesuaian antara laporan kegiatan dan laporan keuangan yang dibuat sendiri oleh AMS, LKM dan kelompok. Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka para pemonitor akan langsung memberikan rekomendasi untuk menyelesaikannya. Sedangkan untuk program di Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah laporan kegiatan dan laporan keuangan hanya dibuat oleh kelompok dan kebanyakan hanya untuk memenuhi standar laporan kegiatan maupun laporan keuangan. Namun hal demikian tidak dipersoalkan oleh pemonitor yang berasal dari Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah, karena semua pelaksanaan perencanaan dan pembelanjaan program dilakukan oleh kontraktor.

Karakteristik Pembawa Program Pemberdayaan

Karakteristik pembawa program yang meliputi komunikasi dengan penerima, menciptakan citra (*image*), agar dapat diterima, melakukan demonstrasi, menarik partisipasi, memanfaatkan budaya masyarakat, tidak kaku dengan ketentuan waktu, kontinuitas implementasi dan pemeliharaan, disajikan pada Tabel 5. Tafsiran dari masing-masing unsur dari karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan Variabel Pembawa Program di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala Kabupaten Seram bagian Barat, 2006.

No	Variabel Pembawa Program (Action)	Nilai Tengah ^{*)}		p-value
		Taniwel	Waesala	
1	Melakukan komunikasi dengan penerima	0.7500	0.3000	0.0077
2	Membuat citra agar yang dibawa dapat diterima	0.8500	0.4000	0.0077
3	Melakukan demonstrasi	0.7500	0.3000	0.0077
4	Menarik partisipasi masyarakat	0.7000	0.3500	0.0301
5	Budaya masyarakat setempat	0.7000	0.3500	0.0301
6	Tidak terlalu kaku dengan waktu yang ditentukan	0.6500	0.3000	0.0301
7	Kontinuitas implementasi	0.8000	0.4000	0.0158
8	Pemeliharaan	0.8500	0.5000	0.0301

Sumber: Olahan Data Primer 2006.

1. Melakukan komunikasi dengan penerima program

Variabel komunikasi yang dilakukan oleh pembawa kepada penerima program menunjukkan bahwa di Kecamatan Taniwel lebih tinggi nilainya daripada di Kecamatan Waesala. Hal terjadi karena di Kecamatan Taniwel pembawa program melakukan komunikasi dengan penerima program sebelum dan pada saat implementasi program pemberdayaan ini, dan bahkan nelayan yang ikut program turut serta dalam menyusun perencanaan program tersebut. Adanya komunikasi antara pembawa dan penerima program menyebabkan masyarakat yang mengikuti program merasa memiliki dan mengerti maksud dari program yang diikutinya, terutama menyangkut keberlanjutan usaha pancing tunda.

Sedangkan komunikasi di Kecamatan Waesala terlihat rendah, karena pembawa program tidak melakukan komunikasi dengan penerima program sebelum penyerahan fasilitas tangkap pancing tunda, komunikasi baru dilakukan pada saat implementasi. Dengan demikian kelompok nelayan sebagai penerima program tidak bisa berbuat apa-apa menyangkut kebijakan yang dilakukan oleh pembawa program, baik menyangkut sarana yang diberikan maupun aturan main, keberlanjutan program.

2. Membuat citra (*image*) agar yang dibawa dapat diterima

Ternyata penerimaan masyarakat terhadap program di Kecamatan Taniwel memperoleh nilai yang lebih baik daripada di Kecamatan Waesala. Hal tersebut terjadi karena di Kecamatan Taniwel implementasi program sesuai dengan ketentuan seperti kemampuan teknis dan administrasi, dimana sebelum program diluncurkan pembawa program telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Sedangkan di Kecamatan Waesala, implementasi program belum sepenuhnya mengikuti ketentuan, karena pembawa program menganggap bahwa hanya kemampuan teknis mengoperasikan mesin dan mahir memancing saja yang menjadi faktor utama, mengabaikan pentingnya pemahaman mengenai aspek administratif, terutama laporan hasil kelompok, baik menyangkut kegiatan maupun keuangan dan kemampuan lainnya, sebelum dan sesudah

pelaksanaannya program. Berdasarkan hal tersebut, kelompok nelayan menganggap bahwa program yang diberikan ini tidak bisa diharapkan untuk berkelanjutan, karena sarana yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga persepsi tidak percaya dari masyarakat terhadap program sangat besar.

3. Melakukan demonstrasi

Kegiatan demonstrasi yang seharusnya dilakukan oleh pembawa kepada penerima program menunjukkan bahwa di Kecamatan Taniwel sangat tinggi daripada di Kecamatan Waesala. Hal tersebut terjadi karena di Kecamatan Taniwel benar-benar telah dilakukan demonstrasi dan pelatihan kepada calon anggota kelompok penerima program, yaitu mengenai cara penggunaan atau pengoperasian dan melakukan pemeliharaannya.

Sedangkan di Kecamatan Waesala tidak dilakukan demonstrasi dan pelatihan, karena pembawa program menganggap bahwa penerima program telah mampu dan trampil, serta terbiasa dengan teknik/cara penangkapan ikan dengan alat tangkap pancing tunda yang disediakan, padahal jenis alat tangkap tersebut berbeda dengan yang biasa mereka gunakan.

4. Menarik partisipasi masyarakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel menarik untuk masyarakat tekuni oleh penerima program di Kecamatan Taniwel masih lebih baik daripada di Kecamatan Waesala. Artinya di Kecamatan Taniwel program ini telah sesuai dengan keinginan masyarakat nelayan daripada di Kecamatan Waesala. Hal ini tampaknya berkaitan dengan kenyataan bahwa di Kecamatan Taniwel program yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) merupakan satu-satunya program pemberdayaan yang pernah dilakukan di daerah ini sehingga masyarakat sangat antusias menekuninya, karena menciptakan mata pencaharian baru bagi mereka.

Sedangkan di Kecamatan Waesala kegiatan usaha pancing tunda merupakan mata pencaharian mereka sehari-hari. Apalagi menurut nelayan, alat dan sarana tangkap yang diberikan belum sesuai dengan yang diharapkan, dimana mesin yang diberikan oleh pembawa program kualitasnya tidak baik dan cepat mengalami kerusakan. Akibatnya, nelayan sulit untuk membayar cicilan wajib pengembalian dana kepada pembawa program, yang operasionalnya ditangani oleh pendamping proyek Lembaga Ekonomi Masyarakat Pesisir Mikro Mitra Mina (PEPM3) di Masohi.

5. Memanfaatkan budaya masyarakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel meningkatkan budaya setempat di Kecamatan Taniwel masih lebih baik daripada di Kecamatan Waesala. Di Kecamatan Taniwel dalam berusaha masih menganggap budaya setempat, terutama dalam memelihara lingkungan usaha (laut), sedangkan di Kecamatan Waesala nelayan tidak memperhatikan budaya pemeliharaan lingkungan dengan baik sehingga tampak wilayah sekitar tempat tinggal para nelayan rusak.

6. Fleksibilitas waktu dalam pelaksanaan

Fleksibilitas pelaksana program, di Kecamatan Taniwel lebih baik daripada di Kecamatan Waesala. Hal tersebut terjadi karena di Kecamatan Taniwel nelayan dan pengurus aliansi yang merumuskan kegiatan sesuai dengan waktu serta kebiasaan masyarakat, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyediaan fasilitas menjadi keputusan bersama.

Sedangkan di Kecamatan Waesala nelayan hanya diberitahu nanti akan diberi bantuan perahu dan mesin untuk perlengkapan penangkapan ikan, sedangkan waktu kukurannya nanti menunggu ketersediaan anggaran padahal sebagai nelayan mereka sangat tergantung pada musim, tidak dapat menunggu terlalu lama.

7. Kontinuitas implementasi

Kontinuitas implementasi program di Kecamatan Taniwel lebih baik dibanding dengan di Kecamatan Waesala. Pelaksanaan program di Kecamatan Taniwel, telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh nelayan peserta. Sedangkan di Kecamatan Waesala pembawa program tidak konsisten dengan apa yang direncanakan, yaitu mesin yang digunakan untuk operasional menangkap ikan kualitasnya tidak baik. Mesin sering mengalami gangguan/kerusakan, sehingga tidak setiap saat dapat digunakan melaut untuk menangkap ikan. Selain itu, penanggung jawab dari pembawa program tidak melakukan pengawasan dan pembinaan kepada nelayan mengenai keberlanjutan program.

8. Pemeliharaan

Analisis variabel pemeliharaan bagi penerima program di kemudian hari, menunjukkan kondisinya Kecamatan Taniwel lebih baik daripada di Kecamatan Waesala. Bagi peserta program di Kecamatan Taniwel, beban ini pemeliharaan ini merupakan tanggung jawab bersama dari Aliansi Masyarakat Sipil, baik kerugian maupun keuntungan, kecuali bila nelayan melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam penggunaan fasilitas tangkap.

Sedangkan di Kecamatan Waesala, beban ini pemeliharaan menjadi tanggung jawab kelompok nelayan sepenuhnya. Beban hutang ini ternyata sulit untuk dilunasi, mengingat biaya operasional tangkap yang lebih tinggi daripada hasil tangkapan nelayan.

Karakteristik Penerima Program Pemberdayaan

Responden dari masing-masing program dipilih berdasarkan kebutuhan dan kemauan, baik dari pemberi maupun penerima program di kedua kecamatan. Untuk Kecamatan Taniwel calon anggota di tentukan berdasarkan kemauan dan keinginan masyarakat yang terlibat dalam kelompok AMS, sedangkan di Kecamatan Waesala dipilih dari masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan baik yang belum maupun yang telah memiliki sarana dan prasarana pancing tunda, yang kemudian membentuk kelompok, dan mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk mendapat dana program pemberdayaan masyarakat nelayan.

Di Kecamatan Taniwel, nelayan yang mengikuti program pemberdayaan adalah nelayan tradisional yang sebelumnya mereka menggunakan sampan digayun (dayung) serta difasilitasi dengan layar yang berukuran kecil. Anggota nelayan ini semua tergabung dalam aliansi masyarakat sipil (AMS) yang dibentuk secara bersama-sama, dan sebagian besar adalah rumahtangga muda. Selain kegiatan melaut (nelayan) mereka juga sebagai petani, pedagang, kerja bangunan apabila keadaan laut tenang, serta ketua kelompok ada yang menjadi perwakilan aktif sebagai pengurus AMS.

Tabel 6. Perbandingan variabel Pemberdayaan di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala Kabupaten Seram bagian Barat, 2006.

No	Variabel Penerima Program (<i>Reaction</i>)	Nilai Tengah ^{*)}		<i>p-value</i>
		Taniwel	Waesala	
A	Motivasi (<i>motivation</i>)			
1	Kebutuhan yang dirasakan (<i>felt need</i>)	0.7500	0.4000	0.0301
2	Manfaat praktis (<i>practical benefit</i>)	0.8500	0.4500	0.0158
3	Dapat meningkatkan gengsi (<i>prestige emulation</i>)	0.7500	0.4000	0.0310
4	Penghargaan (<i>reward</i>)	0.7000	0.4000	0.0301
5	Hal yang baru (<i>novelly</i>)	0.6500	0.3000	0.0301
B	Budaya Tradisional (<i>Tradisional Culture</i>)			
1	Struktur sosial (<i>social structure</i>)			
	a.Peran dan status individu	0.7500	0.4000	0.0301
	b.Kekerabatan	0.7000	0.3000	0.0158
	c.Kelompok Kepentingan dan Kemimpinan	0.6500	0.3000	0.0301
2	Pola ekonomi	0.7000	0.3000	0.0301
C	Kesehatan	0.8500	0.4500	0.0158
D	Pola konsumsi masyarakat	0.6500	0.3000	0.0301
E	Sistem nilai yang ada dalam masyarakat	0.7000	0.3500	0.0301

Sumber: Olahan Data Primer 2006

Sedangkan di Kecamatan Waesala, responden yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat adalah nelayan yang setiap saat melaut kecuali keadaan laut tidak memungkinkan, dan sebagian besar umur di atas 30 tahunan. Selain aktifitas sebagai nelayan, ada juga berprofesi sebagai petani apabila cuaca laut tidak baik, dan pedagang yang dijalankan sehari-hari oleh istri dan anak, suami hanya sebagai pembeli dagangan di Kota Ambon (menggunakan motor laut).

Determinan Penerima Program (*Reaction*)

Determinan dari penerima program meliputi variabel motivasi (yaitu mencakup manfaat, gengsi, saingan, penghargaan, dan hal baru), budaya tradisional (*traditional culture*) yang terdiri dari peran individu, status individu, kekerabatan, kasta, etnik, politik, kewenangan pusat, kelompok kepentingan, kepemimpinan, dan persaudaraan dalam agama, serta pola kehidupan (yang termasuk komponen agama, kepercayaan, kesehatan, pasrah, dan hal yang negatif), pola rekreasi, pola konsumsi, dan sistem nilai yang berlaku (Niehoff and Anderson 1964). Hasil uji statistik dari variabel determinan penerima program disajikan pada Tabel 6, Penjelasan rinciannya sebagai berikut:

A. Motivasi

Program pemberdayaan masyarakat yang berlangsung di kedua kecamatan faktor motivasi sangat memberikan manfaat praktis, meningkatkan gengsi, penghargaan, dan hal yang baru bagi peserta penerima program. Uraian menyangkut motivasi ini akan dijelaskan sebagai berikut: Untuk Kecamatan Taniwel program tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ini sangat baik, karena rencana dan implementasinya telah sesuai, dimana pada saat konflik yang terjadi di Maluku alternatif yang dapat dilakukan dalam kegiatan usaha hanyalah pancing tunda, karena program ini telah dirancang bersama antara pengurus dan para nelayan yang ingin mengikuti program pemberdayaan.

Sedangkan hasil analisis untuk Kecamatan Waesala masih sangat rendah, hal ini diakibatkan oleh tidak sesuainya pelaksanaan program dengan kebutuhan nelayan yang telah disepakati diawal perencanaan oleh pembawa program dan penerima program. Terutama menyangkut kebutuhan nelayan perihal mesin yang kurang diperhatikan oleh pembawa program, padahal mesin merupakan tulang punggung dari usaha pancing tunda. Tanpa didukung oleh mesin yang baik, tidak sering rusak, usaha ini tidak akan berhasil.

1. Kebutuhan yang dirasakan

Program pemberdayaan yang telah dicanangkan ternyata sangat dibutuhkan oleh penerima program di Kecamatan Taniwel, karena kebanyakan mereka masih menggunakan alat tangkap tradisional dengan menggunakan perahu kole tanpa mesin. Relatif rendahnya nilai penerimaan nelayan peserta program di Kecamatan Waesala karena sebagian dari mereka memang telah terbiasa menggunakan peralatan pancing tunda karena perusahaan pembeli ikan hasil tangkapan nelayan menyediakan mesin untuk nelayan yang berkeinginan dan telah memiliki perahu, dimana pembayaran dilakukan dengan cara mencicil disaat penjualan hasil tangkapannya kepada perusahaan tersebut. Bagi nelayan yang tidak mampu menganggap program ini sangat bermanfaat bagi mereka, baik sebagai fasilitas penangkapan ikan maupun alat transportasi laut yang sangat dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga seperti membeli bahan makanan, mengambil kayu bakar, berobat ke pulau lain dan sebagainya.

2. Dapat meningkatkan gengsi

Berdasarkan analisis dari variabel ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Taniwel lebih baik daripada di Kecamatan Waesala. Ini berkaitan dengan kenyataan bahwa, program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Taniwel merupakan program baru yang pernah dilaksanakan dan diadakan oleh PKM Wilayah Maluku untuk membantu pengungsi dalam bidang usaha. Sedangkan di Kecamatan Waesala nelayan dan masyarakat sejak lama telah mengusahakannya, baik dengan membeli sendiri maupun dari pihak swasta yang menyediakan fasilitas tersebut. Sedangkan bagi nelayan yang tidak mampu, program ini sangat mengangkat gengsi mereka.

3. Penghargaan

Analisis dari variabel penghargaan menunjukkan bahwa, di Kecamatan Taniwel lebih baik dibanding dengan di Kecamatan Waesala. Karena bagi nelayan di Kecamatan Taniwel program ini merupakan program yang baru yang pernah mereka rasakan, maka mereka menganggapnya sebagai suatu penghargaan yang berarti, bagi mereka dan juga mereka juga belum terbiasa menggunakan alat dan fasilitas penangkapan ikan dengan menggunakan mesin boot.

Nilai yang rendah di Kecamatan Waesala karena bagi sebagian nelayan peserta program pemberdayaan hal tersebut bukan merupakan hal baru. Mereka sudah terbiasa dengan alat tangkap dan mesin yang disediakan. Akan tetapi bagi nelayan yang belum memiliki fasilitas pancing tunda program ini dianggap sebagai suatu penghargaan yang sangat berarti dan diharapkan.

4. Hal yang baru

Program pemberdayaan masyarakat ini dianggap sebagai hal yang baru, bagi masyarakat di Kecamatan Tanwel belum banyak di antara mereka yang memiliki dan menggunakan sarana pancing tunda ini, sehingga menganggapnya sebagai sesuatu yang baru bagi mereka. Sedangkan bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Waesala program ini bukan sesuatu yang baru bagi mereka, karena profesi nelayan khususnya pancing tunda sudah merupakan pekerjaan tetap yang mereka lakukan sehari-hari di pulau tempat tinggalnya..

B. Budaya Tradisional

1. Struktur Sosial

a. Peran dan status individu

Hasil analisis dari struktur sosial menunjukkan bahwa Kecamatan Taniwel memperoleh nilai yang lebih baik dibandingkan dengan di Kecamatan Waesala. Peran dan status individu di Kecamatan Taniwel lebih mengakar kepada tradisi masyarakat, dibanding dengan di Kecamatan.

Status individu merupakan sesuatu yang diterima dari struktur sosial warisan generasi terdahulu. Hal ini terlihat jelas dari kedudukan individu di dalam Negeri Adat. Mereka masih menjunjung tinggi nilai tradisi yang ada, terutama dalam memilih pemimpin,

Sedangkan di Kecamatan Waesala, peran dan status individu di dalam struktur sosial lebih ditentukan capaian yang diperoleh dari interaksi sosial mereka, baik kemampuan ekonomi maupun sosial masing-masing.

b. Keekerabatan

Dari analisis struktur sosial kelompok kekerabatan menunjukkan bahwa di Kecamatan Taniwel lebih baik, dibandingkan dengan di Kecamatan Waesala. Hal ini erat kaitannya dengan kenyataan bahwa ikatan gandong atau pela, walaupun beda keyakinan, masih sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sedangkan di Kecamatan Waseala ikatan gandong atau pela

tidak sekuat di Kecamatan Taniwel, karena adat Melayu merupakan budaya Islam yang dibawa oleh nenek moyang mereka dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara lebih dominan.

c. Kelompok kepentingan dan kepemimpinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kelompok kepentingan dan kepemimpinan masih sangat kuat mendukung program ini di kedua wilayah kecamatan, tetapi di Kecamatan Taniwel masih lebih baik bila dibandingkan dengan di Kecamatan Waesala, walaupun nilai yang diperoleh dari kedua kecamatan ini tidak jauh berbeda. Hal ini terutama disebabkan oleh kuatnya kelompok kepentingan dan kepemimpinan yang ada, di Kecamatan Taniwel terutama untuk Kelompok yang menggunakan program pemberdayaan ini sebagai alat untuk menggunakan aspirasi masyarakat dalam upaya masa terutama pasca kerusuhan di Maluku.

2. Pola ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Taniwel lebih baik daripada Kecamatan Waesala. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa di Kecamatan Taniwel hasil program berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitarnya, antara lain hasil tangkapan yang diperoleh nelayan sebagian dipasarkan oleh kelompok jibu-jibu (ibu-ibu penjual ikan), dan sebagian lagi di proses oleh kelompok pengawet ikan (ikan asin), sehingga pola ekonomi masyarakat menjadi lebih hidup dan berkembang. Sedangkan di Kecamatan Waesala, hasil tangkapan nelayan langsung dipasarkan pada pengusaha pembeli ikan yang berpangkalan di lokasi Pulau Kelang dan Pulau Kasuari, sehingga ekonomi masyarakat lokal tidak berkembang karena kaitan kedepannya tidak ada.

C. Kesehatan

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tingkat kesehatan di Kecamatan Taniwel lebih baik daripada di Kecamatan Waesala. Hal ini terjadi karena fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Taniwel sudah sangat baik dan tersedia, terutama rumah sakit dan puskesmas, sedangkan di lokasi Kecamatan Waesala, khususnya di pulau Kasuari, fasilitas kesehatan tidak tersedia. Fasilitas kesehatan yang ada hanya tersedia di ibu kota kecamatan saja, dan rumah sakit berada di Piru ibu kota kabupaten, sehingga apabila ada keluarga nelayan yang menderita sakit harus ke pulau lain untuk berobat serta memerlukan dana yang besar.

D. Pola konsumsi masyarakat

Pola konsumsi masyarakat di Kecamatan Taniwel lebih baik dibanding dengan di Kecamatan Waesala. Pola konsumsi masyarakat di Kecamatan Taniwel sudah banyak menggunakan pola konsumsi perkotaan, dimana masyarakatnya lebih banyak mengonsumsi beras sebagai makanan pokok, sedangkan ubi dan sagu di konsumsi sebagai makanan tambahan keluarga, sedangkan di Kecamatan Waesala, terutama di Pulau Kasuari yang jauh dari pasar ketersediaan kebutuhan sembako masih sangat terbatas, sehingga mereka masih mengonsumsi ubi kayu sebagai makanan pokok di samping beras bila ada.

E. Sistem nilai

Sistem nilai dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Taniwel jauh lebih kuat, dibandingkan dengan di Kecamatan Waesala. Sebagaimana dikemukakan terdahulu di Kecamatan Taniwel ikatan pela/gandong dan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam ("sasi") masih sangat kuat, sedangkan di Kecamatan Waesala ikatan tersebut walaupun masih diakui tetapi sudah melemah. Penggunaan bom dan pembiusan (potasium) masih kerap dilakukan karena tergiur oleh pendapatan yang tinggi sesaat saja.

Stok *Existing* Modal Sosial Penerima Program Tingkat Integrasi

Modal sosial terbagi atas tiga bagian yaitu dimensi struktural, dimensi kognitif, dan aksi kolektif (Grootaert and van Bastaeler 2002). Tampak di dalam Tabel 7, bahwa stok *existing* modal sosial masyarakat baik dimensi struktural, dimensi kognitif, maupun aksi kolektif di Kecamatan Taniwel lebih tinggi daripada Kecamatan Waesala. Hal ini sejalan dengan tingkat integrasi program pemberdayaan, yaitu di Kecamatan Taniwel lebih tinggi daripada Kecamatan Waesala. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa program pemberdayaan di wilayah yang memiliki stok modal sosial yang tinggi lebih terintegrasi dibandingkan dengan wilayah dengan stok modal sosial yang rendah.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Pantoja (1999) yang menegaskan ketiadaan kohesi sosial menjadi tantangan utama bagi keberhasilan pemberdayaan masyarakat di India. Karena itu pilihan strategi pengembangan masyarakat semakin dipengaruhi oleh stok modal sosial dari penerima program. Sedangkan Reid and Salmen (2002) menemukan bahwa tingkat kohesi sosial yang ada di dalam masyarakat merupakan determinan tunggal keberhasilan program intervensi penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah di Mali

Tabel 7. Stok *Existing* Modal Sosial dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, 2006.

No	Modal Sosial	Kode Variabel	Indeks Kecamatan		<i>p-value</i>
			Taniwel	Waesala	
I	Integrasi	ITR	0.600	0.400	0.0380
II	Modal Sosial Masyarakat	MSM	0.5940	0.3510	0.0000
A	Dimensi Struktural	DS	0.5590	0.3880	0.0010
B	Dimensi Kognitif	DK	0.6535	0.3510	0.1220
C	Aksi Kolektif	AK	0.5265	0.3740	0.0190

Sumber: Olahan Data Primer 2006.

Dimensi struktural

Indeks komposit dari dimensi struktural di Kecamatan Taniwel lebih baik bila dibandingkan dengan di Kecamatan Waesala. Hal tersebut terlihat dari kepadatan keanggotaan

(*density of membership*), keragaman keanggotaan (*diversity membership*), partisipasi dalam pembuatan keputusan, serta dukungan dalam situasi krisis di Kecamatan Taniwel memiliki nilai yang lebih baik bila dibandingkan dengan di Kecamatan Waesala. Terlihat pada Tabel 8, bahwa derajat pembatas/pengucilan di Kecamatan Waesala sangat tinggi, dan di Kecamatan Taniwel sangat rendah.

Kepadatan keanggotaan (*Density of membership*), yaitu menyangkut persentase rumahtangga menjadi anggota organisasi yang berada di dalam komunitas/desa, organisasi yang terpenting bagi rumahtangga, serta jumlah anggota rumahtangga dalam komunitas di Kecamatan Taniwel lebih baik bila dibandingkan di Kecamatan Waesala. Begitu juga dengan keragaman keanggotaan yang meliputi keragaman keanggotaan organisasi yang dimasuki rumahtangga, kekerabatan, agama, jenis kelamin, umur, keanggotaan dalam partai politik, pekerjaan, dan pendidikan, nilai di Kecamatan Taniwel lebih baik daripada di Kecamatan Waesala. Hal ini dimungkinkan karena ketersediaan organisasi, baik pemerintahan, sosial kemasyarakatan (kelembagaan adat), keagamaan, kepemudaan (olah raga dan seni), ekonomi (usaha kelompok, dagang), politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan yang lainnya yang lebih lengkap daripada di Kecamatan Waesala.

Tabel 8. Dimensi Struktural Stok *Existing* Modal Sosial dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, 2006.

No	Modal Sosial	Kode Variabel	Indeks Kecamatan		<i>p-value</i>
			Taniwel	Waesala	
A	Dimensi Struktural	DS	0.5560	0.3945	0.001
1	Kepadatan Keanggotaan	DS1	0.4840	0.3665	0.049
2	Keragaman Keanggotaan	DS2	0.6005	0.5005	0.078
3	Partisipasi di Dalam Pembuatan Keputusan	DS3	0.6100	0.3800	0.001
4	Dukungan di Dalam Situasi Krisis	DS4	0.6310	0.3715	0.002
5	Derajat Pembatasan	DS5	0.3540	0.5475	<i>Tdk sign</i>

Sumber: Olahan Data Primer 2006.

Partisipasi anggota rumahtangga di dalam pembuatan keputusan menunjukkan bahwa di Kecamatan Taniwel lebih baik daripada di Kecamatan Waesala. Hal ini terlihat dalam keterlibatan anggota rumahtangga di samping tokoh masyarakat di Kecamatan Taniwel yang ikut serta dalam pengambilan keputusan, baik di dusun, desa maupun di kecamatan, sedangkan di Kecamatan Waesala yang ikut serta anggota rumahtangga di dalam pengambilan keputusan hanya tokoh masyarakat saja, dan untuk masyarakat biasa hanya akan memperoleh hasil yang telah diputuskan.

Dukungan yang berasal dari lingkungan atau desa ketika mengalami krisis di Kecamatan Taniwel lebih baik dibandingkan dengan di Kecamatan Waesala, dimana keterlibatan anggota rumahtangga dalam mengatasi hal tersebut sangat tampak, misalnya pada saat kerusuhan yang

terjadi di Maluku, masyarakat di Kecamatan Taniwel khususnya di wilayah penelitian, maka masih sempat menolong saudara-saudara dari Pulau Ambon yang terkena musibah dengan cara membangun permukiman baru untuk menetap. Sedangkan di Kecamatan Waesala masyarakat hanya membantu warga yang mengalami musibah hanya sebatas pada keluarga mereka saja, karena adanya keterbatasan lahan tempat menampung.

Dimensi Kognitif

Indeks komposit dari dimensi kognitif modal sosial di Kecamatan Taniwel lebih tinggi dibandingkan dengan di Kecamatan Waesala. Keadaan ini dapat dilihat dari derajat kesetiakawanan, kepercayaan, dan kerjasama, serta penyelesaian konflik lebih baik di Kecamatan Taniwel bila dibandingkan dengan di Kecamatan Waesala. Derajat kesetiakawanan di dalam kelompok maupun antar kelompok berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa di Kecamatan Taniwel adalah lebih baik, karena terbangun dalam asosiasi yang mereka lakukan bersama-sama, ketimbang di Kecamatan Waesala, yang di dalam kelompok maupun antar kelompok di bentuk atas dasar program yang diikuti.

Hasil analisis untuk peubah kepercayaan menunjukkan bahwa di Kecamatan Taniwel lebih baik dibandingkan dengan di Kecamatan Waesala. Hal ini terjadi di Kecamatan Waesala, masing-masing kelompok cenderung mengejar hasil tangkapan sebesar-besarnya, yang menjadi kebiasaan mereka sebelum mengikuti program, untuk dapat melunasi cicilan hutang mereka kepada pemilik modal. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap sesama antar kelompok, dimana tempat-tempat yang mereka ketahui terdapat banyak ikan tidak akan diberitahukan kepada kelompok lain. Sedangkan di Kecamatan Taniwel rasa kesetiakawanan kelompok nelayan masih tinggi, di saat melaut mereka selalu bersama-sama.

Terlihat pada Tabel 9, bahwa kerjasama di Kecamatan Taniwel lebih baik dari Kecamatan Waesala. Hal ini disebabkan karena peubah kerjasama dibangun atas dasar tanggung bersama baik dalam menanggung beban maupun pendapatan, sebagai contoh, pada saat teman kelompok tidak melaut maka pendapatan dari hasil tangkapani setelah memenuhi kewajiban menyettor akan dibagikan juga kepadanya. Sedangkan di Kecamatan Waesala anggota yang melaut saja yang memperoleh penghasilan, dan tidak dibagikan kepada anggota kelompok lain yang tidak ikut melaut, walau kewajiban menyettor tetap ditanggung bersama. Dalam hal ini, kepercayaan dan kerjasama di antara kelompok masih terlihat cukup baik di kedua kecamatan penelitian ini. Kepedulian mereka terhadap anggota kelompok yang mengalami musibah seperti kehabisan bahan bakar, terbawa arus dan sebagainya sangat tinggi.

Penyelesaian konflik di Kecamatan Taniwel lebih baik daripada Kecamatan Waesala, karena bila terdapat persoalan di antara sesama anggota kelompok maupun antar kelompok atau dengan pihak lain, maka hal ini akan diselesaikan secara bersama oleh asosiasi (AMS), sedangkan di Kecamatan Waesala, persoalan tersebut akan diselesaikan oleh masing-masing individu dan anggota kelompok saja.

Tabel 9. Dimensi Kognitif Stok *Existing* Modal Sosial dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, 2006.

No	Modal Sosial	Kode Variabel	Indeks Kecamatan		<i>p-value</i>
			Taniwel	Waesala	
B	Dimensi Kognitif	DK	0.6535	0.3510	<i>0.0001</i>
1	Derajat Kesetiakawanan	DK1	0.6655	0.1665	<i>0.000</i>
2	Kepercayaan	DK2	0.6315	0.4430	<i>0.021</i>
3	Kerjasama	DK3	0.6190	0.4530	<i>0.010</i>
4	Penyelesaian Konflik	DK4	0.7190.	0.3155	<i>0.008</i>

Sumber: Olahan Data Primer, 2006.

Aksi Kolektif

Aksi kolektif di Kecamatan Taniwel lebih tinggi daripada di Kecamatan Waesala, sebagaimana tampak pada Tabel 10. Demikian pula ketiga indikator pembentuknya, yang meliputi tingkat aksi kolektif, jenis kegiatan kolektif, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif di Kecamatan Taniwel lebih tinggi di dibandingkan dengan di Kecamatan Waesala.

Selanjutnya, terlihat bahwa jenis kegiatan kolektif, yang meliputi: ikut di dalam kegiatan pemilihan umum, aktif dalam perkumpulan, melakukan kontak dengan orang yang berpengaruh di pemerintah, aktif mengikuti kampanye pemilihan umum, ikut di dalam kerja bakti di lingkungannya, bertemu dengan anggota DPRD kabupaten, ikut dalam pertemuan dengan pemerintah, berdiskusi dengan pihak lain tentang suatu masalah, melaporkan suatu masalah kepada polisi/pengadilan, menyumbang uang pada pihak yang membutuhkan, serta ikut sebagai sukarelawan organisasi amal. Hasil penelitian untuk peubah ini menunjukkan aktivitas tersebut di Kecamatan Taniwel lebih baik daripada di Kecamatan Waesala. Hal ini terlihat pada kegiatan masyarakat yang tergabung dalam kelompok nelayan pancing tunda di Kecamatan Taniwel yang lebih aktif keikutsertaannya, sedangkan di Kecamatan Waesala masih belum semua anggota masyarakat yang turut serta dan aktif di dalam lingkungannya karena belum tersedianya fasilitas untuk itu.

Tabel 10. Aksi Kolektif Stok *Existing* Modal Sosial dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, 2006.

No	Modal Sosial	Kode Variabel	Indeks Kecamatan		<i>p-value</i>
			Taniwel	Waesala	
C	Aksi Kolektif	AK	0.5265	0.3740	0.019
1	Tingkat Aksi Kolektif	AK1	0.4885	0.3940	0.000
2	Jenis Kegiatan Kolektif	AK2	0.7395	0.3055	0.000
3	Kesediaan untuk Partisipasi dalam Aksi Kolektif	AK3	0.5510	0.3660	0.006

Sumber: Olahan Data Primer, 2006

Pengukuran yang dilakukan menyangkut kesediaan untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif adalah sampai sejauhmana kondisi lingkungan (semangat berpartisipasi secara umum dalam komunitas) mendukung anggota rumahtangga untuk ikut di dalam kegiatan pembangunan, serta menciptakan ketentraman di dalam komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Taniwel lebih baik daripada di Kecamatan Waesala. Hal ini terlihat pada aktivitas masyarakat yang tergabung dalam kelompok nelayan pancing tunda, di Kecamatan Taniwel lebih aktif berpartisipasi, dibandingkan dengan di Kecamatan Waesala. Hal ini terutama disebabkan oleh lokasi program di Kecamatan Taniwel terletak di ibukota kecamatan, sedangkan di Kecamatan Waesala berada pada dusun-dusun yang terpencil.

Dampak Program terhadap Peningkatan Integrasi dan Peningkatan Stok Modal Sosial

Integrasi program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu penentuan keberhasilan yang akan dirasakan oleh masyarakat target maupun yang tidak mengikutinya. Apabila program ini berlangsung dengan baik dan berkelanjutan, masyarakat target akan dapat melanjutkan usaha yang diikutinya secara berkelanjutan, dan bagi mereka yang tidak sempat terlibat dalam program tersebut maka yang dirasakan adalah keberadaan program untuk mendapat jasa, fasilitas dan hasil yang dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 11. Dampak Pemberdayaan terhadap Peningkatan Integrasi dan Stok Modal Sosial di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, 2006.

No	Modal Sosial	Kode Variabel	Indeks Kecamatan Sebelum		<i>p-value</i>	Indeks Kecamatan Sesudah		<i>p-value</i>
			Taniwel	Waesala		Taniwel	Waesala	
I	Integrasi	ITR	0.6000	0.4000	0.0380	0.6448	0.1887	0.0000
II	Modal Sosial Masyarakat	CSC	0.5940	0.3510	0.0000	0.6670	0.2730	0.0001
A	Dimensi Struktural	DS	0.5590	0.3880	<i>0.0010</i>	0.0595	0.0300	0.0002
B	Dimensi Kognitif	DK	0.6535	0.3510	<i>0.1220</i>	0.6825	0.3210	0.0001
C	Aksi Kolektif	AK	0.5265	0.3740	<i>0.0190</i>	0.5230	0.2545	0.0000

Sumber: Olahan Data Primer 2006.

Tampak pada Tabel 11, bahwa program pemberdayaan berdampak positif terhadap peningkatan modal sosial masyarakat di Kecamatan Taniwel, sedangkan di Kecamatan Waesala berdampak negatif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pola *bottom-up*, maka partisipasi meningkat sehingga meningkatkan stok modal sosial. Selanjutnya, terlihat pula bahwa sebelum adanya program pemberdayaan, dimensi kognitif di kedua kecamatan tidak berbeda secara nyata, namun setelah adanya program pemberdayaan, perbedaan dalam dimensi kognitif di kedua kecamatan menjadi sangat nyata.

Pola pendekatan *bottom-up* di Kecamatan Taniwel ini berawal dari pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat umum untuk terlibat dalam penentuan usaha yang mula dari persiapan, proses, penentuan kebijakan, implementasi, hingga penanganan dan pengembangan keberlanjutan program. Kontras dengan ini, pola pendekatan *top-down* yang dijalankan di Kecamatan Waesala bersifat proyek, dimana anggaran yang ada untuk pengadaan sarana dan prasarana program diadakan langsung oleh pimpro dan atau kontraktor, tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh sebab itu, hasil capaian dari program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LSM di Kecamatan Taniwel lebih baik dan terintegrasi daripada pola pemberdayaan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Tengah di Kecamatan Waesala.

Dampak langsung yang dinikmati masyarakat adalah terbentuknya kelompok-kelompok usaha lain yang mendukung seperti jibu-jibu oleh ibu-ibu rumahtangga yang membeli hasil tangkapan dan selanjutnya dijual ke pasar maupun ke desa/dusun di sekitarnya, serta kelompok pengasapan ikan/pembuatan ikan asin. Dampak yang tidak langsung berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga terjadinya perubahan sikap dan perilaku dari masyarakat target maupun yang tidak. Sedangkan untuk di Kecamatan Waesala masih belum banyak memberikan dampak yang berarti bagi keberlangsungan program pemberdayaan yang di adakan, baik langsung maupun tidak langsung.

Selain dampak langsung dan tidak langsung, dampak yang tak kurang penting yang dirasakan masyarakat target maupun tidak adalah dampak fisik dan non-fisik. Untuk dampak fisik yang ditimbulkan oleh adanya program pemberdayaan di Kecamatan Taniwel adalah dapat

meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru sehingga keberlangsungan program akan memberikan kesan terhadap manfaat yang dirasakan baik oleh pembawa program maupun masyarakat target serta masyarakat lainnya. Dampak fisik yang dirasakan oleh masyarakat target di Kecamatan Waesala, masih belum nampak karena adanya fasilitas yang sama yang disediakan oleh pengusaha pembelian hasil tangkapan kepada masyarakat yang berminat untuk menjalankan usaha pancing tunda.

Dampak non-fisik dari program pemberdayaan yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Taniwel adalah berupa peningkatan kemampuan berpartisipasi masyarakat target yang mejadi lebih kritis untuk dapat menerima program-program baru sehingga menimbulkan tingkat kerjasama kelompok yang semakin kokoh serta kemampuan perencanaan yang handal. Hal ini masih belum nampak di Kecamatan Waesala karena masyarakat target tidak diberi kewenangan untuk mengembangkan diri mereka dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengembangkan kinerja, karena mereka hanya diberi tanggung jawab sebagai pelaksana program, yang setiap saat harus melaut untuk memperoleh hasil tangkapan agar dapat mengembalikan dana kredit yang mereka terima dalam bentuk sarana dan prasarana tangkap pancing tunda.

Berdasarkan pemahaman penulis menyangkut dana program pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh LSM maupun dinas terkait, merupakan dana abadi (*trust fund*) yang dalam menjalankan usaha oleh masyarakat diwajibkan untuk membayar/melunasinya agar digulirkan kembali oleh penanggung jawab kepada orang/kelompok lain dalam wilayah yang sama. Hal ini telah dijalankan di Kecamatan Taniwel, karena pendamping program berada di ibukota kecamatan. Sedangkan di wilayah Kecamatan Waesala hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena penanggung jawab tidak bertempat di lokasi program, sehingga pendampingan tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada peserta program maupun menggulirkannya kepada orang/kelompok baru yang masih membutuhkan fasilitas yang sama.

Dengan adanya dana abadi ini, diharapkan keberlanjutan program dapat berlangsung di wilayah target lokasi program dan selanjutnya bergulir pada pihak/orang/kelompok lain yang belum menikmati kucuran dana/sarana dan prasaran untuk meningkatkan, mengembangkan usaha dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di perdesaan. Oleh sebab itu, pengelolaan usaha yang dilakukan pendamping sangat diharapkan keberadaannya di lokasi program agar memantau, mengelola maupun mengawasi usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat target sehingga mereka bertanggung jawab terhadap usaha yang telah diterima melalui program pemberdayaan masyarakat nelayan, baik program dari pemerintah maupun dari LSM ataupun dari pihak lain (swasta).

Dampak Program terhadap Peningkatan Dimensi Struktural

Secara keseluruhan dimensi struktural masyarakat dari variabel kepadatan keanggotaan dan partisipasi dalam pembuatan keputusan, serta derajat pembatas di dalam dusun, desa maupun asosiasi/kelompok, baik yang ada di dalam lingkungan maupun dari luar (Tabel 12). tidak mengalami peningkatan yang berarti setelah adanya program pemberdayaan masyarakat di

Kecamatan Taniwel, bahkan di Kecamatan Waesala mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, dipengaruhi oleh kepadatan keanggotaan dalam wilayah tempat tinggal peserta program sehingga mereka tidak serius untuk menentukan pilihan pada organisasi yang diikutinya, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota. Tampak di Kecamatan Waesala partisipasi dalam pembuatan keputusan mereka tidak banyak terlibat karena status mereka hanya sebagai pelaksana kebijakan yang diambil oleh tokoh masyarakat dan masyarakat adat saja. Sedangkan di Kecamatan Taniwel kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan ada untuk organisasi di luar AMS, tetapi mereka tidak mau terlibat terlalu jauh, karena mereka terfokus pada AMS. Namun pada keragaman keanggotaan mengalami peningkatan di kedua kecamatan, karena organisasi yang tersedia mereka ikuti, baik organisasi di luar maupun di dalam kelompok nelayan program pemberdayaan yang jelas-jelas menjanjikan untuk dikembangkan. Selain itu juga situasi kerusuhan lalu dimana anggota memiliki keterbatasan finansial, dengan sendirinya mereka berupaya untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari terlebih dahulu.

Tabel 12. Dampak Program Pemberdayaan terhadap Peningkatan Dimensi Struktural Stok Modal Sosial di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, 2006.

No	Modal Sosial	Kode Variabel	Indeks Kecamatan Sebelum		p-value	Indeks Kecamatan Sesudah		p-value
			Taniwel	Waesala		Taniwel	Waesala	
A	Dimensi Struktural	DS	0.5590	0.3880	0.0010	0.5950	0.3000	0.0002
1	Kepadatan Keanggotaan	DS1	0.6005	0.5005	0.0490	0.4840	0.2400	0.0180
2	Keragaman Keanggotaan	DS2	0.6200	0.3600	0.9780	0.7025	0.5500	0.0310
3	Partisipasi Dalam Pembuatan Keputusan	DS3	0.6310	0.3715	0.0100	0.6200	0.2400	0.0000
4	Dukungan Dalam Situasi Krisis	DS4	0.6310	0.3715	0.0280	0.6700	0.4000	0.0000
5	Derajat Pembatasan	DS5	0.3540	0.5475	Tidak Sig	0.4285	0.5475	Tidak Sig

Sumber: Olahan Data Primer 2006.

Dampak Program terhadap Peningkatan Dimensi Kognitif

Dampak pemberdayaan terhadap peningkatan dimensi kognitif, sebagaimana disajikan pada Tabel 13, menunjukkan bahwa dimensi kognitif, di Kecamatan Taniwel mengalami peningkatan, walaupun secara sendiri-sendiri tampak bahwa derajat kesetiakawanan dan kepercayaan tidak mengalami peningkatan, sementara kerjasama, dan penyelesaian konflik mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi akibat keterlibatan anggota dalam perkumpulan yang

mereka ikuti, sehingga aktifitas lain sangat terbatas, kecuali terhadap sesama anggota kelompok atau antar kelompok. Keadaan ini juga disebabkan karena pendekatan program yang bersifat partisipatif walaupun melibatkan masyarakat, namun karena pendekatan program yang selama ini bersifat *top-down* sehingga pendekatan partisipatif tidak dalam seketika dapat mempengaruhi derajat kesetiakawanan dan kepercayaan mereka. Gambaran ini menunjukkan bahwa kesetiakawanan dan kepercayaan masyarakat nelayan antara sesama mereka telah terbangun sejak awal program karena mereka merasa senasip dan sepenanggungan. Kenyataan ini ditunjukkan oleh variabel kerjasama dan penyelesaian konflik, dimana pendekatan partisipatif memberi peningkatan nilai yang lebih baik dibanding dengan di Kecamatan Waesala yang menggunakan pendekatan *top-down*.

Tabel 13. Dampak Pemberdayaan terhadap Peningkatan Dimensi Kognitif Stok Modal Sosial di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, 2006

No	Modal Sosial	Kode Variabel	Indeks Kecamatan Sebelum		p-value	Indeks Kecamatan Sesudah		p-value
			Taniwel	Waesala		Taniwel	Waesala	
B	Dimensi Kognitif	DK	0.6535	0.3510	0.122	0.6825	0.3210	0.0001
1	Derajat Kesetiakawanan	DK1	0.6655	0.1655	0.034	0.6655	0.1665	0.0000
2	Kepercayaan	DK2	0.6315	0.4430	0.021	0.6315	0.4430	0.0147
3	Kerjasama	DK3	0.6190	0.4130	0.010	0.6775	0.39500	0.0000
4	Penyelesaian Konflik	DK4	0.7190	0.4530	0.008	0.7445	0.3950	0.0000

Sumber: Olahan Data Primer 2006.

Penurunan nilai yang terjadi di Kecamatan Waesala, terutama pada variabel kerjasama dan penyelesaian konflik, dimana kerjasama di dalam lingkungan mereka sudah mengarah pada usaha yang mereka ikuti saja, sedangkan di luar kelompok kurang terbangun karena keseharian mereka hanya melaut, dan setelah dari melaut mereka mempersiapkan, memperbaiki alat dan sarana melaut untuk aktivitas hari esoknya. Untuk variabel penyelesaian konflik khususnya pada mereka yang terlibat dalam maupun di luar kelompok selalu diatasi sendiri-sendiri oleh mereka, baik penyelesaiannya di pemerintahan dusun/desa dan bahkan pada yang berwajib (kepolisian)

Dampak Program terhadap Peningkatan Aksi Kolektif

Dampak program pemberdayaan terhadap peningkatan aksi kolektif disajikan (Tabel 14), terlihat bahwa aksi kolektif, tingkat aksi kolektif, jenis kegiatan kolektif dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif di Kecamatan Taniwel lebih baik dibanding dengan di Kecamatan Waesala. Tampak bahwa aksi kolektif di Kecamatan Taniwel mengalami peningkatan, tetapi variabel kegiatan kolektif dan aksi kolektif tidak mengalami peningkatan yaitu sama, sedangkan jenis kegiatan kolektif bahkan menurun. Penurunan ini diakibatkan oleh kegiatan kolektif yang ada telah bergeser dari kebiasaan yang dilakukan secara sukarela atau gotongroyong

berubah menjadi kegiatan yang berorientasi pada upahan (bersifat proyek desa). Hal tersebut mengakibatkan kebiasaan masyarakat yang saling bantu membantu (adat setempat berupa masohi/gotong royong) sudah mulai luntur secara perlahan-lahan. Selanjutnya, di Kecamatan. Keadaan tersebut mulai dibangkitkan pada saat pemekaran kabupaten, dimana mereka memacu mengejar ketertinggalan dari desa/dusun yang lain di Kabupaten Seram bagian Barat secara bersama-sama dan pihak lain (LSM). Nilai aksi kolektif dan kesediaan untuk berpartisipasi dari masyarakat nelayan di Kecamatan Taniwel lebih baik daripada di Kecamatan Waesala karena dipengaruhi oleh pendekatan program. Pendekatan partisipatif yang dilakukan di Kecamatan Taniwel mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sukarela dan gotongroyong yang sejak lama mulai memudar akibat dari pendekatan yang bersifat *top-down*, hal ini nyata terlihat di Kecamatan Waesala, dimana kecenderungan penurunan ini dibanding dengan kondisi sebelum ada program pemberdayaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendekatan program yang bersifat *top-down* di Kecamatan Waesala jelas tidak dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai aksi kolektif seperti yang dialami oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Taniwel.

Tabel 14. Dampak Pemberdayaan terhadap Peningkatan Aksi kolektif di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, 2006

No	Modal Sosial	Kode Variabel	Indeks Kecamatan Sebelum		p-value	Indeks Kecamatan Sesudah		p-value
			Taniwel	Waesala		Taniwel	Waesala	
C	Aksi Kolektif	AK	0.5265	0.3740	0.0190	0.5230	0.2545	0.0000
1	Tingkat Aksi Kolektif	AK1	0.4715	0.4000	0.0000	0.4715	0.2865	0.0158
2	Jenis Kegiatan Kolektif	AK2	0.7565	0.4000	0.0000	0.8980	0.2395	0.0000
3	Kesediaan untuk Berpartisipasi dalam Aksi kolektif	AK3	0.5510	0.4000	0.0060	0.5510	0.3210	0.0000

Sumber: Olahan Data Primer 2006.

Dampak Integrasi Program terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Analisis *Goodness of fit Tests* Lampiran 9 dan 10, menunjukkan bahwa secara keseluruhan dimensi struktural (DS), dimensi kognitif (DK), aksi kolektif (AK), indeks modal sosial (IMS) dan jumlah anggota rumahtangga (JART), berpengaruh nyata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara sendiri-sendiri semua peubah, kecuali jumlah anggota rumahtangga berpengaruh sangat nyata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan tampak bahwa masing-masing program pemberdayaan berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan peserta. Namun dibandingkan dengan di Kecamatan Waesala, peningkatan kesejahteraan di Kecamatan Taniwel lebih tinggi. Ini ditunjukkan oleh besaran $\Delta B/\Delta C$ "incremental cost benefit ratio", $\Delta B/\Delta C$ program pemberdayaan di Kecamatan Taniwel ($\Delta B/\Delta C = 6.1146372$) yang lebih tinggi daripada di Waesala ($\Delta B/\Delta C = 3.8146969$). Gambaran terinci mengenai hal ini disajikan pada Lampiran 11.

Tafsiran lebih lanjut dari masing-masing peubah sebagaimana terlihat pada Tabel 16 adalah sebagai berikut: Peningkatan satu satuan dimensi struktural, akan diikuti dengan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua kecamatan sebesar 1.00 kali lipat, ceteris paribus. Peningkatan satu satuan dimensi kognitif (Tabel 17), maka akan diikuti dengan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi di Kecamatan Taniwel (1.00 kali lipat) daripada di Kecamatan Waesala (0.997 kali lipat).

Tabel 15. Koefisien Regresi Modal Sosial terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram bagian Barat.

Peubah	Kecamatan Taniwel			Kecamatan Waesala		
	Koefisien regresi	p-value	Odds ratio	Koefisien regresi	p-value	Odds ratio
Konstanta	626.231	0.285866	-	906.3543	0.314645	-
Dimensi Struktural	1371.133	0.000503	1.000	2633.205	0.000262	1.000
Dimensi Kognitif	1945.642	0.000174	1.000	-494.765	0.000117	0.997
Aksi Kolektif	2276.826	0.001233	1.000	1608.734	0.000559	3.043
Indeks Modal Sosial	466.4372	0.000188	0.001	327.143	0.000000	0.001
Jumlah Anggota Rumahtangga	-4.82918	0.240842	1.408	-9.78344	0.201078	0.680

Sumber: Olahan Data Primer 2006.

Sedangkan setiap peningkatan satu satuan aksi kolektif, maka akan diikuti dengan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi di Kecamatan Waesala (3.043 kali lipat) daripada di Kecamatan Taniwel (1.00 kali lipat). Sedangkan peningkatan integrasi program pemberdayaan sebesar satu

Tabel 16. Koefisien Regresi Komponen Dimensi Struktural yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Rumah tangga di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram bagian Barat.

Peubah	Kecamatan Taniwel			Kecamatan Waesala		
	Koefisien Regresi	p-value	Odds Ratio	Koefisien Regresi	p-value	Odds Ratio
Dimensi Struktural	1371.133	0.000503	1.000	2633.205	0.00026	1.000
Kepadatan Keanggotaan	-522.426	0.00161	0.004	-688.595	0.00055	0.001
Keragaman Keanggotaan	-470.838	0.002185	0.001	-972.36	0.00060	0.001
Partisipasi dlm Pembuatan Keputusan	-511.126	0.002587	0.591	-923.886	0.00134	0.001
Dukungan dlm Situasi Krisis	-466.418	0.00145	0.002	-893.68	0.00048	0.001
Derajat Pembatasan	-554.842	0.324593	0.001	-942.894	0.00554	0.001

Sumber: Olahan Data Primer 2006.

satuan akan diikuti dengan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang besarnya sama di kedua kecamatan, yaitu 0.001 kali lipat.

Dari dimensi struktural (DS) yang menonjol adalah partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan di Kecamatan Taniwel (Tabel 16). Peningkatan satu satuan partisipasi anggota ceteris paribus, akan meningkatkan peluang peningkatan kesejahteraan rumah tangga sebesar 0,591 kali lipat.

Tabel 17. Koefisien Regresi Dimensi Kognitif terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Rumah tangga di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram bagian Barat.

Peubah	Kecamatan Taniwel			Kecamatan Waesala		
	Koefisien Regresi	p-value	Odds Ratio	Koefisien Regresi	p-value	Odds Ratio
Dimensi Kognitif	1945.642	0.00017	1.000	-494.765	0.0001	0.997
Derajat Kesetiakawanan	-305.05	0.0000	0.001	-107.648	0.0061	0.001
Kepercayaan	-483.026	0.00434	0.041	27.08944	0.0026	0.001
Kerjasama	-746.029	0.00031	0.001	163.5374	0.0120	0.001
Penyelesaian Konflik	-560.248	0.00100	0.001	56.16591	0.0001	0.001

Sumber: Olahan Data Primer 2006.

ceteris paribus, akan meningkatkan peluang peningkatan kesejahteraan rumah tangga di Taniwel sebesar 3.073 kali lipat. Dan peningkatan satu satuan aksi kolektif jenis kegiatan, akan meningkatkan peluang peningkatan kesejahteraan rumah tangga di Waesala sebesar 2.147 kali lipat

Tabel 18. Koefisien Regresi Aksi Kolektif yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga di Kecamatan Taniwel dan di Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram bagian Barat

Peubah	Kecamatan Taniwel			Kecamatan Waesala		
	Koefisien Regresi	p-value	Odds Ratio	Koefisien Regresi	p-value	Odds Ratio
Aksi Kolektif Tingkat Aksi Kolektif (AK1)	2276.826	0.00123	1.000	1608.734	0.00055	3.043
Jenis Kegiatan Kolektif (AK2)	-979.566	0.01208	3.073	-647.203	0.00917	0.001
Partisipasi dlm Aksi Kolektif (AK3)	-236.376	0.00031	0.028	20.84414	0.00044	2.147
	-1337.36	0.00274	0.001	-892.644	0.00102	0.001

Sumber: Diolah dari Data Primer 2006.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari uraian dan bahasan pada bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Taniwel lebih berhasil dan lebih dapat meningkatkan kesejahteraan rumahtangga peserta dan masyarakat di sekitarnya daripada di Kecamatan Waesala.

Kunci keberhasilan ini terletak pada pendekatan yang partisipatif (*bottom-up*), yang memanfaatkan dengan baik modal sosial masyarakat sedemikian sehingga program pemberdayaan menjadi terintegrasi dengan keinginan masyarakat, dan karenanya masyarakat nelayan merasa memilikinya

Saran

Dari simpulan di atas, maka disarankan agar:

1. Pembawa program perlu berorientasi untuk membangkitkan dan menguatkan proses partisipatif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi serta pengendalian program.
2. Program pemberdayaan masyarakat nelayan yang diadakan oleh pemerintah maupun donatur lainnya perlu memperhatikan keperluan, kebutuhan maupun budaya/tradisi yang telah tertanam dalam masyarakat, seperti "sasi" sebagai wadah untuk menjaga/memelihara sumberdaya, serta lembaga pendampingan dalam pembinaan kelompok-kelompok usaha untuk diberdayakan sesuai fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Maluku, 2003. Maluku Tengah dalam Angka, Tahun 2003. BPS Provinsi Maluku
- BPS Provinsi Maluku. 2004. Kabupaten Seram bagian Barat dalam Angka 2004. BPS Provinsi Maluku
- Coleman, J. S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology. Volume 94
- Eldridge, P. J. 1995. Non Government Organization and Democratic Participation in Indonesia, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Gonarsyah. I. 2006. Suatu Tanggapan terhadap RUU tentang Dewan Penasihat Presiden dan RUU tentang Kementerian Negara, Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU tentang Dewan Penasihat Presiden dan RUU tentang Kementerian Negara, DPR RI, Jakarta, Kamis 8 Juni 2006.
- Grootaert, C. (1999). Social Capital, Household Welfare, and Poverty in Indonesia. Policy Research Working Paper No. 2148. The World Bank Social Development Department.
- Grootaert, Christian and Thierry van Bastelaer (editors), 2002. Understanding and Measuring Social Capital. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington.
- Kabupaten Seram bagian Barat. 2004. Laporan Kegiatan Pancing Tonda. 2004. Aliansi Masyarakat Sipil (AMS), Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku.
- Kartjono. 1988. Pengalaman Bina Desa Dalam Memperkuat Rakyat, yang diacu dalam Ibrahim R Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000. CESDA-LP3ES.
- Krishna, A. (2000) Creating and Harnessing Social Capital, in Sosial Capital: A Multifaceted Perspective, edited by Partha Dasgupta and Ismail Sergeldin. Fds.duke.edu/db/aas/Political Science/Faculty/Krishna/Publication-16k.
- Lin Nan. 2001. Social Capital. *A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge University Press.
- Narayan, D. 1999. Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty. Property Group, Prem World Bank July 1999.
- Narayan, D and L. Pritchett. 1999. "Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania." Economic Development and Cultural Change, Forthcoming.
- Niehof, A.H. and C.M. Anderson 1964; *Introducing Social Change from Chicago*: Aldine Publishing Company. 1964.
- Prijono, O. S, 1995. Peran Organisasi Nirlaba, Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat, serta Pola Interaksi dengan Pemerintah. Diacu dalam Bando et al. Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia, Jakarta: CSIS.
- Prijono, O. S. dan A. M. W. Pranaka (penyunting). 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Centre for Strategic and international Studies, Jakarta.

- Reid, C. and Salmen 2000. Social Capital Productivity and Innovation in Rural Areas, Understanding Social Capital: Agricultural Extensions in Mali: Trust and Social Cohesion, Social Capital Initiative Working. www.socialcapitalgateway.org/NV-eng-propertyrural.htm-52k.
- Riyadi dan D. S. Bratakusumah, 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Thomas, R. L. 1997. Modern Econometrics. Departement of Economics, Manchester Metropolitan University. Addison Wesley Longman Limited, England.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003, Tentang Pemekaran Kabupaten Seram bagian Barat.
- Uphoff, N. 2000. Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation, in Dugasputa and I. Seregaldin (eds). Social Capital: A Multifaced Perspective, World Bank, Washington, DC.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian Kabupaten Seram bagian Barat



Lampiran 2. Indikator Pengukuran, Definisi Operasional, dan Tahap Pengolahan Data Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator	Definisi Operasional	Skala Pengukuran (Tabulasi Data dari Kuisioner)	Pengolahan Data Tahap 1	Pengolahan Data Tahap 2
I. MODAL SOSIAL	Indeks Komposit A, B, C			
A. Dimensi Struktural	Indeks Komposit dari rata-rata proporsi A.1 s/d A.5		Skala 0-100	Indeks 0-1
1. Kepadatan Keanggotaan	Jumlah keanggotaan rumahtangga di dalam asosiasi lokal di dalam desa/kelurahan.	Skala 1-13	Skala 0-100	Indeks 0-1
2. Keragaman Keanggotaan	Rata-rata keragaman keanggotaan di dalam 3 asosiasi lokal (paling penting) yang dimasuki rumahtangga	Skala 1-3 1=sedikit berbeda 2=cukup berbeda 3=sangat berbeda	Skala 0-100	Indeks 0-1
3. Partisipasi Rumahtangga Di Dalam Pembuatan Keputusan	Rata-rata dari proporsi tingkat partisipasi pembuatan keputusan di dalam 3 asosiasi lokal (paling penting) yang dimasuki rumahtangga	Skala 1-3 1=pemimpin memutuskan dan menginformasikan kepada anggota 2=pemimpin menanyakan kepada anggota tetapi pemimpin yang membuat keputusan sendiri. 3=anggota diajak untuk memutuskan bersama.	Skala 0-100	Indeks 0-1
4. Dukungan dalam situasi krisis	Rata-rata dari proporsi A.4.a dan A.4.b		Skala 0-100	Indeks 0-1
a.	Rata-rata dari proporsi pihak-pihak yang terlibat di dalam menyelesaikan masalah pendidikan	Skala 1-5 1=tidak seorangpun 2=pemerintah kabupaten 3=perkumpulan desa 4=orangtua murid 5=seisi desa/lingkungan	Skala 0-100	Indeks 0-1
.	Rata-rata dari proporsi pihak-pihak yang terlibat di dalam menyelesaikan masalah gagal panen, penyakit, pencurian	Skala 1-5 1=rumahtangga sendiri saja 2=tetangga saja 3=pemerintah kabupaten 4=Ketua RT, RW, kepala dusun/lingkungan 5=seisi desa/lingkungan	Skala 0-100	
5. Derajat Pembatasan	Rata-rata dari proporsi A.5.a dan A.5.b		Skala 0-100	Indeks 0-1

a.	Rata-rata dari proporsi 10 sumber perbedaan yang mengkotakkan orang di dalam desa/lingkungan	Interval, skala 1-3 1=perbedaan tidak mengkotakkan orang di dalam desa/lingkungan 2=perbedaan sedikit mengkotakkan orang di dalam desa/lingkungan 3= perbedaan sangat mengkotakkan orang di dalam desa/lingkungan	Skala 0-100	Indeks 0-1
b.	Proporsi dari 11 jenis fasilitas/jasa di mana anggota rumahtangga tidak dilayani atau dibatasi aksesnya.	Ordinal, skala 0 dan 1 0=akses dibatasi/tidak dilayani 1=akses tidak dibatasi/dilayani	Skala 0-100	
B. Dimensi Kognitif	Indeks komposit dari rata-rata proporsi C.1.a dan C.1.b		Skala 0-100	Indeks 0-1
1. Kesetiakawanan	Rata-rata dari proporsi B.1.a dan B.1.b		Skala 0-100	Indeks 0-1
a.	Proporsi dari 11 pihak yang pertama sekali memberikan pertolongan ketika rumahtangga mengalami musibah	Skala 1-11	Skala 0-100	Indeks 0-1
b.	Proporsi dari 11 pihak yang pertama sekali memberikan pertolongan ketika rumahtangga mengalami kerugian secara ekonomi	Skala 1-11	Skala 0-100	
2. Kepercayaan	Rata-rata dari proporsi B.2.a s/d B.2.d		Skala 0-100	Indeks 0-1
a.	Rerata dari proporsi penilaian responden tentang saling percaya diantara warga desa/dusun dalam hal pinjam meminjam	Skala 0 dan 1 0=tidak saling percaya 1=saling percaya	Skala 0-100	Indeks 0-1
b.	Rerata dari proporsi penilaian responden tentang perkembangan saling percaya antar warga di dalam desa/dusun selama satu tahun terakhir	Skala 1-3 1=menjadi lebih buruk 2=sama saja 3=menjadi lebih baik	Skala 0-100	
c.	Rata-rata dari proporsi penilaian responden tentang saling percaya antar warga di dalam desa dusun dibandingkan dengan desa/dusun lain	Skala 1-3 1=lebih rendah daripada desa/dusun lain, 2 =sama dengan desa/dusun lain, 3=lebih tinggi daripada desa/dusun lain.	Skala 0-100	
d.	Rerata dari proporsi kepercayaan responden terhadap orang lain untuk menjaga barang miliknya apabila hendak meninggalkan desa/dusun untuk sementara waktu	Skala 1-5, 1=tidak seorangpun dipercaya 2=anggota keluarga lain 3=tetangga,4=seseorang di desa/lingkungan yang dipercaya, 5=selain 2,3,4	Skala 0-100	

3. Kerjasama	Rata-rata dari proporsi B,1 s/d B.4		Skala 0-100	Indeks 0-1
a.	Rerata dari proporsi sikap responden tentang potensi kerjasama yang dimiliki teman di dalam desa/dusun	Skala 0 dan 1 0=tidak memiliki potensi kerjasama 1=memiliki potensi kerjasama	Skala 0-100	Indeks 0-1
b.	Rerata dari proporsi kepercayaan responden terhadap orang lain untuk menjaga barang miliknya apabila hendak meninggalkan desa/dusun untuk sementara waktu	Skala 1-5 1=tidak seorangpun dipercaya, 2=anggota keluarga lain, 3=tetangga 4=seseorang di desa/dusun yg dipercaya 5=selain 2,3,4	Skala 0-100	
c.	Rerata dari proporsi sikap responden tentang potensi orang lain di dalam desa/lingkungan untuk lebih berkorban bagi kesejahteraan desa/dusun daripada keluarganya sendiri	Skala 1-4 1=sangat setuju 2=setuju 3=tidak setuju 4=sangat tidak setuju	Skala 0-100	
d.	Rerata dari proporsi sikap responden tentang kesediaan orang lain di dalam desa/dusun untuk mengorbankan waktu proyek yang tidak bermanfaat langsung bagi keluarganya sendiri	Skala 0 dan 1 0=tidak bersedia mengorbankan waktu 1=bersedia mengorbankan waktu	Skala 0-100	
e.	Rata-rata dari proporsi sikap responden tentang kesediaan orang lain di dalam desa/lingkungan untuk mengorbankan waktu proyek yang tidak bermanfaat langsung bagi keluarganya sendiri	Skala 0 dan 1 0=tidak bersedia mengorbankan waktu 1=bersedia mengorbankan waktu	Skala 0-100	
4. Penyelesaian Konflik	Rata-rata dari proporsi B.4.a s/d B.4.f		Skala 0-100	Indeks 0-1
a.	Rata-rata dari proporsi penilaian responden tentang ketentraman di desa/lingkungannya tanpa membandingkan dengan desa/lingkungan lain.	Skala 0 dan 1 0=tidak tentram 1=tentram	Skala 0-100	Indeks 0-1
b.	Rata-rata dari proporsi penilaian responden tentang jumlah konflik di desa/lingkungannya dibandingkan dengan desa/lingkungan lain.	Skala 1-3 1=lebih banyak 2=sama 3=lebih sedikit	Skala 0-100	
c.	Rata-rata dari proporsi penilaian responden tentang kesediaan warga di desa/dusunnya untuk menyumbangkan uang dan waktu bagi tujuan pembangunan di desa/dusun .	Skala 0 dan 1 0=tidak mau menyumbang 1=mau menyumbang	Skala 0-100	
d.	Rerata dari proporsi penilaian responden tentang kesediaan warga di desa/lingkungannya untuk menyumbangkan uang dan waktu bagi tujuan pembangunan di desa/dusunnya dibandingkan desa/dusun lain.	Skala 1-3 1=lebih sedikit 2=sama 3=lebih banyak	Skala 0-100	

e.	Rata-rata dari proporsi penilaian responden tentang keharmonisan hubungan antara warga di desa/dusun	Skala 0 dan 1 0=tidak menyenangkan 1=harmonis	Skala 0-100	
f.	Rerata dari proporsi penilaian responden tentang keharmonisan hubungan antara warga di desa/dusunnya dibandingkan dengan desa/dusun lain.	Skala 1-3 1=kurang harmonis 2=sama 3=lebih harmonis	Skala 0-100	
C. Aksi Kolektif	Indeks Komposit dari rerata proporsi C.1 s/d C.3		Skala 0-100	Indeks 0-1
1. Tingkatan Aksi Kolektif	Rata-rata dari proporsi C.1.a dan C.1.b		Skala 0-100	Indeks 0-1
a.	Rerata dari proporsi keikutsertaan di dalam musyawarah pembangunan desa/dusun dalam setahun terakhir	Skala 0-3 0=tidak pernah, 1=sekali 2=beberapa kali, 3=sering	Skala 0-100	Indeks 0-1
b.	Rerata dari proporsi frekuensi kerjasama dengan orang lain untuk kepentingan umum didalam desa/dusun	Skala 0-3 0=tidak pernah, 1=sekali, 2=beberapa kali, 3=sering	Skala 0-100	
2. Jenis Kegiatan Kolektif	Rerata dari proporsi C.2.a dan C.2.b		Skala 0-100	Indeks 0-1
a.	Rerata dari proporsi 11 jenis kegiatan yang dilakukan secara kolektif	Skala 1-11	Skala 0-100	Indeks 0-1
b.	Rerata dari proporsi dari pengetahuan mengenai 11 jenis kegiatan yang dilakukan secara kolektif di dalam desa/dusunnya	Skala 1-11	Skala 0-100	
3. Kesiediaan Berpartisipasi Di Dalam Aksi Kolektif	Rata-rata dari proporsi C.3.a dan C.3.c		Skala 0-100	Indeks 0-1
a.	Rerata dari proporsi penilaian responden tentang peluang bagi warga di desa/kelurahan berpartisipasi di dalam proyek pembangunan di desa/dusunnya	Skala 1 dan 2 1=diputuskan oleh pemimpin di desa/ dusun, 2=seluruh warga ikut ambil keputusan	Skala 0-100	Indeks 0-1
b.	Rerata dari proporsi penilaian responden tentang semangat partisipasi warga di desanya	Skala 1 dan 2 1=rendah 2=tinggi	Skala 0-100	
c.	Rerata dari proporsi penilaian responden tentang jumlah warga di desa/kelurahannya yang memiliki pikiran sama untuk menciptakan kenyamanan di desa/ dusunnya	Skala 1 dan 2 1=tidak banyak 2=banyak	Skala 0-100	
II. PEMBERDAYAAN				
1. Motivasi	Vektor dari variabel motivasi masyarakat nelayan penerima program.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
2. Komunikasi	Efektifitas komunikasi yang dibangun oleh pembawa program dengan penerima program di dalam perencanaan	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1

	dan implementasi program.			
3. Role	Kemampuan dari pembawa program untuk menciptakan <i>image</i> agar program yang dibawa dapat diterima oleh masyarakat nelayan penerima program, diukur dari kemampuan di dalam berbahasa, pemahaman terhadap budaya lokal, kemampuan teknis dan administrasi.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
4. Demonstrasi	Pemberian penyuluhan dari pembawa program kepada masyarakat nelayan mengenai penggunaan alat pancing tonda dengan melakukan demonstrasi langsung di lapangan.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
5. Partisipasi	Tingkat pelibatan masyarakat nelayan secara sukarela di dalam perencanaan dan implementasi program.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
6. Tradisi	Upaya dari pembawa program untuk menyesuaikan program yang dibawa dengan budaya lokal.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
7. Penentuan kelompok	Pemilihan masyarakat sasaran yang sesuai dengan program yang dibawa oleh donor.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
8. Penentuan waktu	Pemilihan waktu yang tepat sesuai dengan budaya lokal.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
9. Fleksibel	Kemampuan dari pembawa program untuk tidak kaku dengan acuan program ketika ada situasi yang tidak sesuai.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
10. Konsistensi	Konsistensi dari pembawa program untuk tetap melanjutkan program di suatu unit masyarakat/kelompok.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
11. Mengawasi biaya	Memelihara atau menjaga biaya hidup, karena dalam kenyataannya menjadi kendala dikemudian hari.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
12. Motivasi	Motivasi yang mendasari keputusan masyarakat nelayan sebagai penerima program, meliputi kebutuhan yang benar-benar dirasakan, manfaat praktis, meningkatkan gengsi, persaingan, penghargaan, program yang diberikan lebih baik dibandingkan yang ada dimasyarakat nelayan.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
13. Struktur	Struktur sosial, meliputi: status	Skala 0 dan 1		Indeks

sosial	dan peran individu di dalam masyarakat, kelompok kesukuan, kelas sosial dan kasta, kelompok etnis, kelompok politik, kewenangan pusat, kepentingan, kepemimpinan, persaudaraan dalam keagamaan.	0=rendah 1=tinggi		0-1
14. Pola ekonomi	Pola ekonomi masyarakat setempat.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
15. kepercayaan	Kepercayaan, meliputi: <i>theological, magical, medical, realistic fatalism, project negativism.</i>	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
16. Pola rekreasi	Pola rekreasi masyarakat setempat.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
17. Pola konsumsi	Pola konsumsi masyarakat setempat.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1
18. Sistem nilai	Sistem nilai yang dianut masyarakat setempat mengenai apa yang benar dan pantas dan sebaliknya.	Skala 0 dan 1 0=rendah 1=tinggi		Indeks 0-1

Lampiran 3. Rumus perhitungan indeks komposit modal sosial

$$ICSC_j = \sum_{i=1}^I \sum_{k=1}^K \frac{NPCSC_{kj} - NPCSC_{kj\min}}{NPCSC_{kj\max} - NPCSC_{kj\min}}$$

dimana:

- $ICSC_j$ = Indeks modal sosial masyarakat di desa/kelurahan r.
- $NPCSC_{ikj}$ = Nilai pengamatan modal sosial individu i untuk indikator k di desa/kelurahan j.
- $NPCSC_{kj\max}$ = Nilai pengamatan tertinggi dari modal sosial untuk indikator k di desa/kelurahan j.
- $NPCSC_{kj\min}$ = Nilai pengamatan terendah dari modal sosial untuk indikator k di desa/kelurahan j.

Lampiran 4. Regresi Model Logit

$$\ln\left(\frac{P_j}{1-P_j}\right) = \beta_0 + \beta_1 DS1_{ihj} + \beta_2 DS2_{ihj} + \beta_3 DS3_{ihj} + \beta_4 DS4_{ihj} + \beta_5 DS5_{ihj} + \beta_6 DK1_{ihj} + \beta_7 DK2_{ihj} + \beta_8 DK3_{ihj} + \beta_9 DK4_{ihj} + \beta_{10} AK1_{ihj} + \beta_{11} AK2_{ihj} + \beta_{12} AK3_{ihj} + \varepsilon_i$$

dimana:

P_j	=	Probabilitas rumahtangga di desa j menjadi sejahtera.
$1 - P_j$	=	Probabilitas rumahtangga di desa j menjadi tidak sejahtera.
$\ln\left(\frac{P_j}{1-P_j}\right)$	=	Logaritma natural dari <i>odds ratio</i> [$P_j/(1-P_j)$], disebut sebagai logit
β_0	=	<i>Intercept</i>
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_{12}$	=	Koefisien regresi dari tiap-tiap variabel penjelas.
$DS1_{ihj}$	=	<i>Density of membership</i> dari individu ke-i di dalam rumahtangga ke-h di desa/kelurahan ke-j
$DS2_{ihj}$	=	<i>Diversity of membership</i> dari individu ke-i di dalam rumahtangga ke-h di desa/kelurahan ke-j
$DS3_{ihj}$	=	Tingkat partisipasi individu ke-i di dalam rumahtangga ke-h di desa/kelurahan ke-j di dalam pembuatan keputusan.
$DS4_{ihj}$	=	Dukungan yang dapat diperoleh dari warga desa/kelurahan ke-j ketika individu ke-i di dalam rumahtangga ke-h mengalami krisis.
$DS5_{ihj}$	=	Derajat pelibatan/keinklusifan individu ke-i dalam rumahtangga ke-h yang berkaitan dengan akses terhadap jasa-jasa/pelayanan di desa/kelurahan ke-j.
$DK1_{ihj}$	=	Kesetiakawanan individu ke-i dalam rumahtangga ke-h di desa/kelurahan ke-j terhadap orang lain di lingkungan/desanya.
$DK2_{ihjk}$	=	Vektor karakter ke-k (kepercayaan terhadap keluarganya, terhadap orang dari suku lain, terhadap pengusaha setempat, terhadap instansi pemerintah setempat, terhadap aparat penegak hukum, terhadap pelayanan pemerintah, dan kepercayaan terhadap kelembagaan dan kepemimpinan lokal) dari tingkat kepercayaan individu ke-i di dalam keluarga ke-h di desa/kelurahan ke-j.
$DK3_{ihj}$	=	Tingkat kerjasama di desa/kelurahan ke-j menurut

		penilaian individu ke-i dari rumahtangga ke-j.
$DK4_{ihj}$	=	Penilaian individu ke-i dari rumahtangga ke-h di desa/kelurahan ke-j mengenai kondisi konflik di lingkungan/desanya dan upaya pemecahan konflik.
$AK1_{ihj}$	=	Tingkat aksi kolektif di desa/kelurahan ke-j menurut penilaian individu ke-i dari rumahtangga ke-j.
$AK2_{ihj}$	=	Jenis aktivitas yang dikerjakan secara kolektif untuk mendapatkan manfaat bersama di desa/kelurahan ke-j oleh individu ke-i dalam rumahtangga ke-h.
$AK3_{ihj}$	=	Kesediaan individu ke-i dari rumahtangga ke-h untuk berpartisipasi di dalam aksi kolektif di desa/kelurahan ke-j.
ε_i	=	<i>Error term</i>

Uji hipotesis terhadap kebaikan model (*goodness of fit test*) menggunakan *chi-square* pada *Hosmer and Lemeshow Test*:

Hipotesis:

H_0 : tidak terdapat perbedaan antara nilai yang diprediksi dari model dengan nilai yang teramati.

H_a : terdapat perbedaan antara nilai yang diprediksi dari model dengan nilai yang teramati.

Keputusan:

- Jika $p\text{-value} \geq \alpha$: terima H_0
- Jika $p\text{-value} < \alpha$: tolak H_0

Uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh semua variabel penjelas secara bersama-sama terhadap variabel terikat:

Hipotesis:

H_0 : semua $\beta = 0$

H_a : sekurang-kurangnya sebuah β tidak sama dengan nol

Keputusan:

- Jika $p\text{-value} \geq \alpha$, maka terima H_0
- Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka tolak H_0

Uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel penjelas terhadap variabel terikat:

Hipotesis:

H_0 : $\beta_i = 0$

H_a : $\beta_i \neq 0$

Keputusan:

- Jika $p\text{-value} \geq \alpha$, maka terima H_0
- Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka tolak H_0

Lampiran 5. Statistik Deskriptif Pemberdayaan di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala

Statistik Deskriptif Kecamatan Taniwel

Variable	Mean	SE Mean	StDev
NO	10.50	1.32	5.92
ACTION	0.8000	0.0205	0.0918
COM	0.7500	0.0993	0.4443
ROLE (IMAGE)	0.8500	0.0819	0.3663
DEMONS	0.7500	0.0993	0.4443
PARTIS	0.7000	0.1050	0.4700
TRADISI	0.7000	0.1120	0.5030
TIMING	0.8000	0.0918	0.4104
FLEKSI	0.6500	0.0918	0.4104
CONFI	0.8000	0.0918	0.4104
MAINT	0.8500	0.0918	0.4104
REACTION	0.7600	0.0130	0.0580
MOTIF,KEBUT	0.7500	0.0918	0.4104
MANFAAT	0.8500	0.0819	0.3663
GENGSI	0.7500	0.0993	0.4443
REWORD	0.7000	0.1050	0.4700
HAL BARU	0.6500	0.1050	0.4700
SS PERAN	0.7500	0.0993	0.4443
SS KEL	0.6500	0.1090	0.4890
KPETINGAN&KPIMPIN	0.6500	0.1090	0.4890
PRSAUDRA	0.8500	0.0819	0.3663
A KEPERC	0.8500	0.0819	0.3663
KSEHATAN	0.7000	0.0688	0.3078
POL EK MAS	0.8500	0.0819	0.3663
POL KONSUM MAS	0.6500	0.1090	0.4890
SIS NILAI--	0.7000	0.1050	0.4700

Statistik Deskriptif Kecamatan Waesala

Variable	Mean	SE Mean	StDev
NO_1	30.50	1.32	5.92
ACTION_1	0.3450	0.0478	0.2139
COM_1	0.3000	0.1050	0.4700
ROLE_1	0.4000	0.1120	0.5030
DEMONS_1	0.3000	0.0918	0.4104
PARTIS_1	0.3500	0.1050	0.4700
TRADISI_1	0.3500	0.1050	0.4700
TIMING_1	0.3000	0.0918	0.4104
FLEKSI_1	0.3000	0.1120	0.5030
CONTI_1	0.4000	0.1140	0.5100
MAINT_1	0.5000	0.1140	0.5100
REACTION_1	0.4060	0.0149	0.0665
MOTIF,KEBUT_1	0.4500	0.1140	0.5100
MANFAAT_1	0.4500	0.1140	0.5100
GENGSI_1	0.4000	0.1090	0.4890
SAINGAN_1	0.4000	0.1120	0.5030
REWORD_1	0.3500	0.1090	0.4890
HAL BARU_1	0.3000	0.1090	0.4890
SS PERAN_1	0.4000	0.1090	0.4890
SS KEL_1	0.3000	0.0990	0.4440
KPETINGAN&IMPIN_1	0.3000	0.1150	0.5130
KSEHATAN_1	0.4500	0.1140	0.5100
POL KONSUM MAS_1	0.3000	0.1050	0.4700
SIS NILAI--_1	0.3500	0.1090	0.4890

Lampiran 6. Uji Nilai Tengah Pemberdayaan di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala

Uji Nilai Tengah Kecamatan Taniwel vs Kecamatan waesala

Mann-Whitney Test and CI: ACTION, ACTION_1

	N	Median
ACTION	20	0.8000
ACTION_1	20	0.3000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.5000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.3000,0.6000)
W = 601.5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0000
The test is significant at 0.0000 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: COM, COM_1

	N	Median
COM	20	1.0000
COM_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 1.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0.0001,0.9999)
W = 500.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0077
The test is significant at 0.0026 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: ROLE, ROLE_1

	N	Median
ROLE	20	1.0000
ROLE_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 1.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0.0002,0.9999)
W = 500.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0077
The test is significant at 0.0019 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: DEMONS, DEMONS_1

	N	Median
DEMONS	20	1.0000
DEMONS_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 1.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0.0001,1.0000)
W = 520.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0077
The test is significant at 0.0003 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: PARTIS, PARTIS_1

	N	Median
PARTIS	20	1.0000
PARTIS_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0001,0.9998)
W = 490.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0301
The test is significant at 0.0065 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: TRADISI, TRADISI_1

	N	Median
TRADISI	20	1.0000
TRADISI_1	20	1.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0001,0.9998)
W = 490.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0301
The test is significant at 0.0065 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: ENVIRON, ENVIRON_1

	N	Median
ENVIRON	20	1.0000
ENVIRON_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 1.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0001,1.0000)
W = 510.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0036
The test is significant at 0.0003 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: FLEKSI, FLEKSI_1

	N	Median
FLEKSI	20	1.0000
FLEKSI_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0001,1.0000)
W = 480.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0301
The test is significant at 0.0125 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: CONTI, CONTI_1

	N	Median
CONTI	20	1.0000
CONTI_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0002,0.9999)
W = 490.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0158
The test is significant at 0.0056 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: MAINT, MAINT_1

	N	Median
MAINT	20	1.0000
MAINT_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0001,1.0000)
W = 480.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0301
The test is significant at 0.0125 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: REACTION, REACTION_1

	N	Median
REACTION	20	0.76000
REACTION_1	20	0.40000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.36000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.31998,0.40003)
W = 610.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0000
The test is significant at 0.0000 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: MOTIV,KEBUT, MOTIV,KEBUT_1

	N	Median
MOTIV,KEBUT	20	1.0000
MOTIV,KEBUT_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0001,1.0000)
W = 480.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0301
The test is significant at 0.0125 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: MANFAAT, MANFAAT_1

	N	Median
MANFAAT	20	1.0000
MANFAAT_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0001,0.9999)
W = 490.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0158
The test is significant at 0.0046 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: GENGGI, GENGGI_1

	N	Median
GENGGI	20	1.0000
GENGGI_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0.0000,0.9999)
W = 490.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0301
The test is significant at 0.0063 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: REWORD, REWORD_1

	N	Median
REWORD	20	1.0000
REWORD_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0002,1.0001)
W = 480.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0301
The test is significant at 0.0149 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: HAL BARU, HAL BARU_1

	N	Median
HAL BARU	20	1.0000
HAL BARU_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0002,1.0001)
W = 480.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0301
The test is significant at 0.0149 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: SS STATUS, SS STATUS_1

	N	Median
SS STATUS	20	1.0000
SS STATUS_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0002,1.0001)
W = 480.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0301
The test is significant at 0.0149 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: SS KEL, SS KEL_1

	N	Median
SS KEL	20	1.0000
SS KEL_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0.0000,0.9999)
W = 490.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0158
The test is significant at 0.0063 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: KPIMPIN, KPIMPIN_1

	N	Median
KPIMPIN	20	1.0000
KPIMPIN_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0002,1.0001)
W = 480.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0301
The test is significant at 0.0149 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: KSEHATAN, KSEHATAN_1

	N	Median
KSEHATAN	20	1.0000
KSEHATAN_1	20	0.5000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0001,1.0001)
W = 490.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0158
The test is significant at 0.0034 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: POL KONSUM MAS, POL KONSUM MAS_1_1

	N	Median
POL KONSUM MAS	20	1.0000
POL KONSUM MAS_1_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0002,1.0001)
W = 480.0

Mann-Whitney Test and CI: POL EK MAS, POL EK MAS_1

	N	Median
POL EK MAS	20	1.0000
POL EK MAS_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 1.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0001,1.0000)
W = 510.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0036
The test is significant at 0.0008 (adjusted for ties)

Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0301
The test is significant at 0.0149 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: SIS NILAI--, SIS NILAI--_1

	N	Median
SIS NILAI--	20	1.0000
SIS NILAI--_1	20	0.0000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0002,1.0001)
W = 480.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0301
The test is significant at 0.0149 (adjusted for ties)

Lampiran 7. Statistik Deskriptif Modal Sosial di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala

Statistik Deskriptif Kecamatan Taniwel

Variable	Mean	SE Mean	StDev
DS_TAN	0.5560	0.0438	0.1959
DS1_TAN	0.4840	0.0785	0.3511
DS2_TAN	0.6005	0.0333	0.1489
DS3_TAN	0.6100	0.0521	0.2331
DS4_TAN	0.6310	0.0520	0.2323
DS5_TAN	0.3540	0.0222	0.0992
DK_TAN	0.6535	0.0536	0.2395
DK1_TAN	0.6655	0.0711	0.3180
DK2_TAN	0.6315	0.0618	0.2763
DK3_TAN	0.6190	0.0515	0.2305
DK4_TAN	0.7190	0.0466	0.2083
AK_TAN	0.5265	0.0527	0.2359
AK1_TAN	0.4885	0.0527	0.2355
AK2_TAN	0.7395	0.0357	0.1599
AK3_TAN	0.5510	0.0698	0.3123

Descriptive Statistics Kecamatan Waesala

Variable	Mean	SE Mean	StDev
DS_WAE	0.3945	0.0256	0.1147
DS1_WAE	0.3665	0.0535	0.2392
DS2_WAE	0.5005	0.0560	0.2503
DS3_WAE	0.3800	0.0343	0.1536
DS4_WAE	0.3715	0.0503	0.2248
DS5_WAE	0.5475	0.0402	0.1800
DK_WAE	0.3510	0.0460	0.2058
DK1_WAE	0.1665	0.0289	0.1293
DK2_WAE	0.4430	0.0356	0.1593
DK3_WAE	0.4530	0.0460	0.2058
DK4_WAE	0.3155	0.0461	0.2064
AK_WAE	0.3740	0.0276	0.1236
AK1_WAE	0.3940	0.0372	0.1663
AK2_WAE	0.3055	0.0408	0.1827
AK3_WAE	0.3660	0.0347	0.1552

Lampiran 8. Uji Nilai Tengah Modal Sosial di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala

Uji Nilai Tengah Modal Sosial Kecamatan Taniwel vs Kecamatan Waesala

Mann-Whitney Test and CI: DS_TAN, DS_WAE

	N	Median
DS_TAN	20	0.06500
DS_WAE	20	0.03500

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.03000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.00999,0.04000)
W = 542.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0001
The test is significant at 0.0001 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: DS1_TAN, DS1_WAE

	N	Median
DS1_TAN	20	0.6700
DS1_WAE	20	0.3300

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.3300
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0001,0.3400)
W = 488.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0490
The test is significant at 0.0490 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: DS2_TAN, DS2_WAE

	N	Median
DS2_TAN	20	0.6700
DS2_WAE	20	0.6700

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0.0000,0.3400)
W = 479.5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0780
The test is significant at 0.0780 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: DS3_TAN, DS3_WAE

	N	Median
DS3_TAN	20	0.6000
DS3_WAE	20	0.2000

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.4000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.2000,0.6001)
W = 574.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0011
The test is significant at 0.0011 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: DS4_TAN, DS4_WAE

	N	Median
DS4_TAN	20	0.7000
DS4_WAE	20	0.4500

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.3000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.1500,0.4500)
W = 527.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0002
The test is significant at 0.0002 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: DS5_TAN, DS5_WAE

	N	Median
--	---	--------

DS5_TAN 20 0.4200
DS5_WAE 20 0.5000

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0.0800
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0.1801,-0.0000)
W = 329.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2

Cannot reject since W is < 410.0

Mann-Whitney Test and CI: DK_TAN, DK_WAE

	N	Median
DK_TAN	20	0.8000
DK_WAE	20	0.3600

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.3700
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.2200,0.5200)
W = 553.5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0001
The test is significant at 0.0001 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: DK1_TAN, DK1_WAE

	N	Median
DK1_TAN	20	0.8600
DK1_WAE	20	0.1200

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.6100
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.3700,0.7401)
W = 562.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0000
The test is significant at 0.0000 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: DK2_TAN, DK2_WAE

	N	Median
DK2_TAN	20	0.6250
DK2_WAE	20	0.4500

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.2250
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.0200,0.3401)
W = 491.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0210
The test is significant at 0.0210 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: DK3_TAN, DK3_WAE

	N	Median
DK3_TAN	20	0.7250
DK3_WAE	20	0.3600

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.3700
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.2099,0.5000)
W = 562.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0010
The test is significant at 0.0010 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: DK4_TAN, DK4_WAE

	N	Median
DK4_TAN	20	0.7950
DK4_WAE	20	0.5200

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.3550
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.2400,0.4700)
W = 562.5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0080
The test is significant at 0.0000 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: AK_TAN, AK_WAE

	N	Median
--	---	--------

AK_TAN 20 0.5300
AK_WAE 20 0.3300

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.3300
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.1900,0.3901)
W = 549.5
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0190
The test is significant at 0.0190 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: AK1_TAN, AK1_WAE

	N	Median
AK1_TAN	20	0.3300
AK1_WAE	20	0.3300

Point estimate for ETA1-ETA2 is -0.0000
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-0.0000,0.3400)
W = 490.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0000
The test is significant at 0.0000 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: AK2_TAN, AK2_WAE

	N	Median
AK2_TAN	20	1.0000
AK2_WAE	20	0.3300

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.6700
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.6600,0.6700)
W = 610.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0000
The test is significant at 0.0000 (adjusted for ties)

Mann-Whitney Test and CI: AK3_TAN, AK3_WAE

	N	Median
AK3_TAN	20	0.6700
AK3_WAE	20	0.3300

Point estimate for ETA1-ETA2 is 0.3400
95.0 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.3300,0.3400)
W = 531.0
Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 > ETA2 is significant at 0.0006
The test is significant at 0.0003 (adjusted for ties)

Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Logit untuk Integrasi Program Pemberdayaan di Kecamatan Taniwel

Link Function: Logit

Response Information

Variable	Value	Count
Pi_TAN	1	12 (Event)
	0	8
Total		20

Logistic Regression Table

Predictor	Coef	SE Coef	Z	P	Odds Ratio	95% CI	
						Lower	Upper
Constant	-3.65005	2.83412	-1.29	0.198			
INTEG_TAN	-3.38459	1.72392	-1.96	0.050	0.03	0.00	0.99
DS_TAN	11.8026	5.92488	1.99	0.046	133595.33	1.21	1.47621E+10

Log-Likelihood = -6.660

Test that all slopes are zero: G = 13.601, DF = 2, P-Value = 0.001

Goodness-of-Fit Tests

Method	Chi-Square	DF	P
Pearson	11.2431	17	0.844
Deviance	13.3190	17	0.715
Hosmer-Lemeshow	8.2790	8	0.407

Table of Observed and Expected Frequencies:

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic)

Value	Group										Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1												
Obs	0	0	1	2	0	1	2	2	2	2		12
Exp	0.1	0.1	0.4	1.0	1.3	1.6	1.8	1.9	1.9	2.0		
0												
Obs	2	2	1	0	2	1	0	0	0	0		8
Exp	1.9	1.9	1.6	1.0	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0		
Total	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		20

Measures of Association:

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities)

Pairs	Number	Percent	Summary Measures
Concordant	87	90.6	Somers' D 0.81
Discordant	9	9.4	Goodman-Kruskal Gamma 0.81
Ties	0	0.0	Kendall's Tau-a 0.41
Total	96	100.0	

Lampiran 10. Hasil Analisis Regresi Logit untuk Integrasi Program Pemberdayaan di Kecamatan Waesala

Link Function: Logit

Response Information

Variable	Value	Count
Pi_wae	1	9 (Event)
	0	11
Total		20

Logistic Regression Table

Predictor	Coef	SE Coef	Z	P	Odds Ratio	95% CI	
						Lower	Upper
Constant	-5.04946	2.30236	-2.19	0.028			
INTEG_wae	-7.94526	3.97636	-2.00	0.046	0.00	0.00	0.86
DS_wae	22.5601	10.4020	2.17	0.030	6.27664E+09	8.78	4.48813E+18

Log-Likelihood = -7.969

Test that all slopes are zero: G = 11.587, DF = 2, P-Value = 0.003

Goodness-of-Fit Tests

Method	Chi-Square	DF	P
Pearson	24.8161	15	0.052
Deviance	13.1663	15	0.589
Hosmer-Lemeshow	8.1558	8	0.418

Table of Observed and Expected Frequencies:

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic)

Value	Group										Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1												
Obs	0	1	0	0	1	0	1	2	2	2		9
Exp	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.7	1.1	1.6	1.9	2.0		
0												
Obs	2	1	2	2	1	2	1	0	0	0		11
Exp	2.0	1.9	1.7	1.5	1.3	1.3	0.9	0.4	0.1	0.0		
Total	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		20

Measures of Association:

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities)

Pairs	Number	Percent	Summary Measures
Concordant	86	86.9	Somers' D 0.75
Discordant	12	12.1	Goodman-Kruskal Gamma 0.76
Ties	1	1.0	Kendall's Tau-a 0.39
Total	99	100.0	

Lampiran 11. Pendapatan Kotor, Biaya Operasional Nelayan Peserta Sebelum dan Sesudah Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala per Tahun

Respon-den	Kecamatan Taniwel		Kecamatan Waesala		Kecamatan Taniwel		Kecamatan Waesala	
	Biaya Operasional (Rp)		Biaya Operasional (Rp)		Pendapatan Kotor (Rp)		Pendapatan Kotor (Rp)	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	576000	1935000	4608000	8865000	7032000	12847500	1080000	3352500
2	540000	1710000	3483000	6930000	6896000	14220000	990000	3600000
3	630000	1935000	4813200	9297000	6826000	12447000	990000	3105000
4	576000	2160000	4473000	8640000	5699000	12123000	972000	3105000
5	540000	1935000	3871800	7353000	5856000	14620500	972000	3847500
6	540000	1935000	3483000	6705000	-625000	14544000	810000	3600000
7	630000	2160000	5067000	9720000	5931000	13819500	972000	3352500
8	540000	1935000	3742200	7137000	6035000	12622500	972000	3253500
9	630000	2115000	5072400	9549000	6728000	14193000	990000	3303000
10	576000	2205000	3933000	7515000	6679000	16222500	1080000	4837500
11	720000	2070000	5166000	9810000	5786000	13972500	972000	3847500
12	576000	2070000	4608000	8730000	6679000	14944500	990000	3847500
13	720000	2160000	5625000	10800000	6510000	15097500	990000	4342500
14	576000	2160000	4089600	7776000	7336000	14791500	1080000	3352500
15	720000	2340000	5392800	10188000	6625000	16146000	990000	4590000
16	576000	2205000	3933000	7515000	4819500	11475000	918000	3105000
17	720000	1935000	5117400	9729000	6600000	13896000	990000	3600000
18	540000	2295000	3731400	7209000	6605000	15120000	990000	3996000
19	630000	2160000	4942800	9288000	6215000	13077000	972000	4095000
20	720000	2205000	4982400	9459000	6287000	14143500	990000	3352500
Total	12276000	34965000	90135000	172215000	120519500	280323000	19710000	73485000
Rerata	613800	2081250	4506750	8610750	6025975	14016150	985500	3674250
	ΔC_1		ΔC_2		ΔB_1		ΔB_2	
	$\Delta B_{21}/\Delta C_{21}$	6.1146372	$\Delta B_{11}/\Delta C_{11}$	7.342375	$\Delta B_{12}/\Delta C_{12}$	4.1372973	$\Delta B_{22}/\Delta C_{22}$	3.8146969

Sumber : Olahan Data Primer 2006